



p-ISSN 2828-707X
e-ISSN 2829-0917

VOL 5 Nomor. 2 Juli 2026

FLURALIS

Faletehan Jurnal Ekonomi dan Bisnis



Diterbitkan oleh :
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Faletehan**

J.FLURALIS

VOLUME

5

NOMOR

2

HALAMAN

1 - 80

PERIODE

Juli

TAHUN

2026



FLURALIS®

FALETEHAN JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

FALETEHAN JURNAL
EKONOMI DAN BISNIS

VOL 5 Nomor. 2 Juli 2026

p-ISSN 2828-707X
e-ISSN 2829-0917

FLURALIS

Jurnal yang berisi tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, resensi buku baru, dan tulisan praktis dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jurnal yang meliputi topik terkait berupa Bisnis dan Manajemen, kewirausahaan, keuangan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasi asuransi, bisnis internasional, logistik, sistem informasi manajemen, manajemen strategi, produksi, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen manufaktur, manajemen publik dan nirlaba, kontrol kualitas, manajemen perpajakan, dan topik terkait lainnya.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Suhroji Adha, SE.,MM

Ketua Dewan Redaksi

Mira Nurhikmat, SE.,MM

Anggota Dewan Redaksi

1. Dr. Ir. Uli Wildan Nuryanto, ST, MM, IPM, CHRA, ASCA
Universitas Bina Bangsa
2. Enji Azizi, SE.,MM
Universitas Faletahan
3. Dr. Djaka Adiwinata, SE.,MM
Universitas Faletahan
4. Irawan, MM
Universitas Faletahan
5. Heri Sapari Kahp, SE.,MM
(Universitas Banten)
6. Vadilla Mutia Zahara, SE.,ME
(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
7. Dr. Nafiudin, SE.,MM
(Universitas Serang Raya)
8. Amelia Anwar, SEI.,ME
(Universitas Muhammadiyah Lampung)



FALETEHAN JURNAL
EKONOMI DAN BISNIS

FLURALIS®

FALETEHAN JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

VOL 5 Nomor. 2 Juli 2026

DAFTAR ISI

p-ISSN 2828-707X

e-ISSN 2829-0917

PENGARUH DIGITAL MARKETING TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN UMKM DI KOTA SERANG

Mulyadi Amin, Neneng Mulyaningsih, Septiyani Putri (Hal 1-8)

PERAN BULLION BANK DALAM MENINGKATKAN LITERASI DAN MINAT INVESTASI EMAS SYARIAH PADA MASYARAKAT DI KOTA SERANG

Ahmad Fathul Najmi, Yulaikah (Hal : 9 - 15)

PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2022

Muhammad Saleh, Meilani Dwi Saputri, Komarudin (Hal 16-23)

AKURASI ALOKASI BIAYA OVERHEAD MENGGUNAKAN ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) PADA UMKM BAKSO IKAN: STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF AKUNTANSI TRADISIONAL DAN SYARIAH

Robin Mulyadi Wijaya (Hal 24-31)

ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Fathurrahman (Hal 32-41)

DETERMINAN INDIKASI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: PERAN AUDIT TENURE, AUDITOR SWITCHING SUKARELA, DAN AUDIT DELAY

Herman Wijaya, Wiwin Arifin (Hal 42-52)

PERAN INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: PENDEKATAN EKONOMI PUBLIK

Setiawandi Hakim (Hal 53-63)

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BBPVP SERANG

Raga Aquino, Iin Farlina, Urfanul Aulia (Hal 64-71)

ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN METODE WORKLOAD INDICATORS OF STAFFING NEED DI RUMAH SAKIT KRAKATAU MEDIKA

Anisa Fitriani, Muhammad Lukman, Inneke Respatiningsih, (Hal 72-80)

PENGARUH DIGITAL MARKETING TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN UMKM DI KOTA SERANG

Mulyadi Amin¹

mulyadiamin@institutbanten.ac.id

Neneng Mulyaningsih²

nenengmulyaningsih99@gmail.com

Septiyani Putri³

septiyaniptr71@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Banten¹⁻³

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of digital marketing on increasing sales for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Serang City. Advancements in information and communication technology have driven a shift in marketing strategies from conventional methods to digital-based marketing. Utilizing digital marketing through social media, online marketplaces, and other digital platforms offers MSMEs opportunities to expand their market reach and enhance promotional effectiveness. This study employs a quantitative method using a survey approach. The study population consists of MSME owners in Serang City who have implemented digital marketing in their business operations. Purposive sampling was used to select 100 respondents. Data were collected via questionnaires and analyzed using simple linear regression. The results indicate that digital marketing has a positive and significant impact on increasing MSME sales in Serang City. This is evidenced by a calculated t-value of 7.845—exceeding the t-table value of 1.984—and a significance level of 0.000 ($p < 0.05$). The coefficient of determination (R^2) of 0.521 indicates that digital marketing accounts for 52.1% of the variation in sales growth, while the remaining percentage is influenced by factors outside the scope of this study. Thus, digital marketing serves as an effective strategy for boosting sales and competitiveness for MSMEs in the digital era.

Keywords: Digital Marketing, Sales, MSMEs, Social Media, Serang City.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan strategi pemasaran dari metode konvensional menuju pemasaran berbasis digital. Pemanfaatan digital marketing melalui media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efektivitas promosi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM di Kota Serang yang telah menerapkan digital marketing dalam kegiatan usahanya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 7,845 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,521 menunjukkan bahwa digital marketing mampu menjelaskan pengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM sebesar 52,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, digital marketing dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penjualan dan daya saing UMKM di era digital.

Kata Kunci: Digital Marketing, Penjualan, UMKM, Media Sosial, Kota Serang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan pemasaran. Transformasi digital yang terjadi saat ini mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna mempertahankan daya saing dan meningkatkan kinerja usaha (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022). Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah pemanfaatan digital marketing sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet dan berbagai platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif.

Digital marketing menjadi salah satu strategi yang semakin penting dalam era ekonomi digital. Melalui media sosial, marketplace, website, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya, pelaku usaha dapat melakukan promosi produk dan berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Kotler, Keller, dan Chernev (2022), digital marketing memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui komunikasi yang cepat, interaktif, dan terukur. Selain itu, digital marketing menawarkan berbagai keunggulan seperti biaya promosi yang relatif rendah, jangkauan pasar yang luas, serta kemudahan dalam mengukur efektivitas kegiatan pemasaran (Ryan, 2021).

Di Indonesia, perkembangan penggunaan internet menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun. Data APJII (2024) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79% dari total populasi. Kondisi ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang semakin

mengandalkan media digital dalam mencari informasi produk, membandingkan harga, hingga melakukan transaksi pembelian. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran yang efektif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses pemasaran yang menghambat pertumbuhan usaha.

Pemanfaatan digital marketing dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mengatasi berbagai kendala pemasaran. Melalui penggunaan media sosial, marketplace, dan platform digital lainnya, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan (Tuten, 2021). Selain itu, digital marketing juga memungkinkan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif lebih terjangkau dibandingkan pemasaran konvensional.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki jumlah UMKM yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan melalui strategi pemasaran digital. Namun, tingkat pemanfaatan digital

marketing oleh pelaku UMKM di Kota Serang masih beragam. Sebagian pelaku usaha telah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan marketplace sebagai sarana promosi, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan sumber daya manusia (Kominfo, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digital marketing memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja usaha dan penjualan UMKM. Penelitian Pradiani (2021) menemukan bahwa penerapan digital marketing mampu meningkatkan volume penjualan usaha rumahan secara signifikan. Penelitian Kurniawati dan Arifin (2023) juga menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan digital marketing, semakin besar peluang UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Pengaruh Digital Marketing terhadap Peningkatan Penjualan UMKM di Kota Serang" menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana digital marketing mampu meningkatkan penjualan UMKM serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pemasaran berbasis digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Digital Marketing

Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Perkembangan teknologi informasi telah

mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan, dari metode pemasaran konvensional menjadi pemasaran berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. Menurut Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022), digital marketing adalah penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online untuk berkontribusi pada aktivitas pemasaran yang bertujuan memperoleh dan mempertahankan pelanggan.

Kotler, Keller, dan Chernev (2022) menjelaskan bahwa digital marketing merupakan penggunaan media digital untuk menjangkau konsumen secara tepat sasaran, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Digital marketing memungkinkan pelaku usaha untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen melalui berbagai platform digital seperti media sosial, website, marketplace, email marketing, dan aplikasi mobile.

Bagi UMKM, digital marketing menjadi salah satu strategi yang penting dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital. Dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas, digital marketing dapat membantu UMKM meningkatkan visibilitas produk, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan (Ryan, 2021).

Menurut Ryan (2021) dan Tuten (2021), indikator digital marketing meliputi:

Accessibility (Aksesibilitas), Kemudahan konsumen dalam mengakses informasi produk melalui media digital. Interactivity (Interaktivitas) Kemampuan media digital dalam memfasilitasi komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen. Informativeness (Kelengkapan Informasi) Kemampuan media digital dalam menyajikan informasi produk yang lengkap dan mudah dipahami. Personalization (Personalisasi) Kemampuan

pemasaran digital dalam menyesuaikan pesan promosi sesuai kebutuhan konsumen. Cost Efficiency (Efisiensi Biaya) Kemampuan digital marketing untuk menekan biaya promosi dibandingkan pemasaran konvensional.

Menurut Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022), manfaat digital marketing antara lain:

1. Memperluas jangkauan pasar.
2. Meningkatkan brand awareness.
3. Mempermudah komunikasi dengan pelanggan.
4. Menghemat biaya pemasaran.
5. Memudahkan evaluasi efektivitas promosi.
6. Meningkatkan peluang penjualan.

Penjualan

Penjualan merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan atau pelaku usaha untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Kotler dan Armstrong (2021), penjualan merupakan proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pertukaran produk atau jasa yang bernilai.

Penjualan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu usaha karena berkaitan langsung dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Tingkat penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan mampu diterima oleh pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen.

UMKM

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan

ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Karakteristik UMKM menurut Tambunan (2021) antara lain:

1. Skala usaha relatif kecil.
2. Modal usaha terbatas.
3. Pengelolaan usaha masih sederhana.
4. Mengandalkan tenaga kerja lokal.
5. Memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam era digital meliputi:

1. Rendahnya literasi digital.
2. Keterbatasan akses teknologi.
3. Persaingan bisnis yang semakin ketat.
4. Kurangnya kemampuan pemasaran digital.
5. Keterbatasan sumber daya manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Serang yang telah memanfaatkan digital marketing dalam kegiatan pemasaran produknya. Responden penelitian berjumlah 100 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti kuliner, fashion, kerajinan, kosmetik, dan jasa. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui media digital.

Digital marketing yang digunakan oleh responden meliputi media sosial (Instagram,

Facebook, TikTok, WhatsApp Business), marketplace (Shopee dan Tokopedia), serta promosi melalui website dan aplikasi pesan instan. Mayoritas responden telah menggunakan digital marketing selama lebih dari satu tahun dalam kegiatan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan digital marketing oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan yang dapat dicapai. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022) yang menyatakan bahwa digital marketing mampu meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran serta memperluas jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

Tingginya nilai rata-rata pada indikator efisiensi biaya menunjukkan bahwa digital marketing memberikan keuntungan bagi UMKM dalam melakukan promosi dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pemasaran konvensional. Melalui media sosial dan marketplace, pelaku UMKM dapat memasarkan produk kepada calon konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk iklan cetak, spanduk, atau promosi secara langsung. Temuan ini mendukung penelitian Ryan (2021) yang menyatakan bahwa salah satu keunggulan utama digital marketing adalah kemampuannya dalam menekan biaya pemasaran dan meningkatkan efektivitas promosi.

Selain itu, digital marketing memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas geografis. Penggunaan platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan marketplace memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan

produk kepada konsumen di luar wilayah Kota Serang. Dengan semakin luasnya jangkauan pasar, peluang terjadinya transaksi penjualan juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradiani (2021) yang menemukan bahwa digital marketing berpengaruh positif terhadap peningkatan volume penjualan usaha kecil dan menengah.

Interaktivitas yang tercipta melalui media digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan. Komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen memungkinkan terjadinya respon yang cepat terhadap pertanyaan, keluhan, maupun kebutuhan pelanggan. Kondisi ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong terjadinya pembelian ulang. Menurut Tuten (2021), interaksi yang baik melalui media digital dapat memperkuat hubungan pelanggan dan meningkatkan loyalitas konsumen.

Nilai koefisien determinasi sebesar 52,1% menunjukkan bahwa digital marketing merupakan faktor yang cukup dominan dalam meningkatkan penjualan UMKM. Namun demikian, masih terdapat 47,9% faktor lain yang memengaruhi penjualan, seperti kualitas produk, harga, inovasi, pelayanan, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, keberhasilan UMKM dalam meningkatkan penjualan tidak hanya ditentukan oleh digital marketing, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola faktor-faktor pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa digital marketing merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan UMKM di Kota Serang. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, mengembangkan konten pemasaran yang menarik, serta memaksimalkan penggunaan

media sosial dan marketplace agar dapat meningkatkan daya saing usaha di era ekonomi digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan digital marketing pada UMKM di Kota Serang berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari tingginya pemanfaatan berbagai platform digital seperti WhatsApp Business, Instagram, TikTok, Facebook, dan marketplace sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Digital marketing dinilai mampu memberikan kemudahan dalam menjangkau konsumen, menyampaikan informasi produk, serta meningkatkan interaksi dengan pelanggan.

Tingkat penjualan UMKM di Kota Serang menunjukkan peningkatan yang cukup baik setelah memanfaatkan digital marketing. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya volume penjualan, frekuensi pembelian, serta pendapatan usaha yang diperoleh pelaku UMKM.

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 7,845 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang dapat diterima.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,521 menunjukkan bahwa digital marketing mampu menjelaskan pengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM sebesar 52,1%, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kualitas produk, harga,

pelayanan, inovasi produk, dan kondisi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). Survei Internet Indonesia 2024. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (8th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Ferdinand, A. (2020). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Febrian, H. (2026). Efisiensi Penggunaan Qris Dalam Transaksi Pembayaran Pada Umkm Di Kabupaten Serang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 38–44.
- Febrian, Habil. 2023. “Analisis Penggunaan Berkelanjutan Digital Banking Dengan Fitur Layanan Sebagai Variabel Moderasi Pada Nasabah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(02):2135–45.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2024. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Literasi Digital Indonesia 2024. Jakarta: Kominfo RI.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Marketing Management (16th ed.). London: Pearson Education.
- Kurniawati, D., & Arifin, Z. (2023). Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal*

- Manajemen dan Kewirausahaan, 11(1), 45–58.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). *E-Commerce: Business, Technology, Society* (18th ed.). New York: Pearson.
- Pradiani, T. (2021). Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 15(1), 23–31.
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2022). Pemanfaatan Digital Marketing bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 112–124.
- Putri, N., & Setiawan, D. (2024). Digital Marketing dan Pertumbuhan Penjualan UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Modern*, 12(3), 101–115.
- Ryan, D. (2021). *Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation* (5th ed.). London: Kogan Page.
- Saputra, R., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Kinerja Pemasaran UMKM di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital Indonesia*, 5(2), 67–79.
- Sussanti Sussanti, Veronica Krisni Damayanti, and Mulyadi Amin. 2024. “Penerapan Pemasaran Digital Sebagai Media Promosi.” *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 4(4):288–95. doi:10.55606/cemerlang.v4i4.3278.
- Swastha, B. (2021). *Manajemen Penjualan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tuten, T. L. (2021). *Social Media Marketing* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Peluang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERAN BULLION BANK DALAM MENINGKATKAN LITERASI DAN MINAT INVESTASI EMAS SYARIAH PADA MASYARAKAT DI KOTA SERANG

Ahmad Fathul Najmi¹

fathulnajmi@institutbanten.ac.id

Yulaikah²

yulaikah.se@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Banten¹

Universitas Faletahan²

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Bullion Banks in improving Islamic financial literacy and interest in sharia gold investment among the people of Serang City. The research used a quantitative method with questionnaires distributed to 100 respondents. Data were analyzed using linear regression. The results show that Bullion Banks have a positive and significant effect on Islamic financial literacy and interest in sharia gold investment. Islamic financial literacy also positively influences investment interest and mediates the relationship between the role of Bullion Banks and investment interest. These findings indicate that education and services provided by Bullion Banks can enhance public understanding and encourage interest in sharia gold investment.

Keywords: Bullion Bank, Islamic Financial Literacy, Investment Interest, Sharia Gold Investment.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bullion Bank dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan minat investasi emas syariah pada masyarakat di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bullion Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah dan minat investasi emas syariah. Literasi keuangan syariah juga terbukti berpengaruh positif terhadap minat investasi emas syariah. Selain itu, literasi keuangan syariah mampu memediasi hubungan antara peran Bullion Bank dan minat investasi emas syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi dan layanan yang diberikan Bullion Bank dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong minat berinvestasi emas syariah.

Kata Kunci: Bullion Bank, Literasi Keuangan Syariah, Minat Investasi, Emas Syariah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuangan syariah tidak hanya menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Salah satu instrumen investasi syariah yang banyak diminati masyarakat adalah emas karena memiliki nilai yang relatif stabil dan mampu melindungi nilai aset dari inflasi (Ascarya & Yumanita, 2022).

Emas telah lama dikenal sebagai instrumen investasi yang aman (safe haven) terutama pada saat terjadi ketidakpastian ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi emas diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama dan lembaga fatwa (Karim, 2021). Oleh karena itu, investasi emas syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim dalam mengembangkan kekayaan sekaligus menjaga nilai aset dalam jangka panjang.

Untuk mendukung pengembangan investasi emas nasional, pemerintah Indonesia menghadirkan inovasi berupa Bullion Bank atau Bank Emas. Bullion Bank merupakan lembaga yang menyediakan layanan penyimpanan, perdagangan, pembiayaan, dan investasi berbasis emas yang terintegrasi dalam sistem keuangan formal. Kehadiran Bullion Bank diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan emas yang dimiliki masyarakat serta memperkuat ekosistem investasi emas nasional (Bank

Indonesia, 2024). Selain itu, Bullion Bank juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan investasi emas yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun potensi investasi emas di Indonesia cukup besar, tingkat literasi masyarakat terhadap investasi emas syariah masih relatif rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada di bawah tingkat literasi keuangan nasional secara umum (OJK, 2024). Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat investasi emas, mekanisme transaksi syariah, serta produk investasi berbasis emas menyebabkan sebagian masyarakat belum memanfaatkan instrumen tersebut secara optimal (Sari & Nugroho, 2023).

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada masyarakat di Kota Serang. Sebagai ibu kota Provinsi Banten yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kota Serang memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi syariah. Namun, masih banyak masyarakat yang menjadikan emas hanya sebagai perhiasan atau tabungan tradisional tanpa memahami manfaatnya sebagai instrumen investasi yang produktif (Rahman, 2023). Selain itu, keterbatasan informasi dan edukasi mengenai investasi emas syariah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk berinvestasi.

Dalam kondisi tersebut, Bullion Bank memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Melalui program edukasi, sosialisasi produk investasi emas, layanan digital, serta pendampingan investasi, Bullion Bank dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan mekanisme

investasi emas syariah dengan lebih baik (Yusuf & Hidayat, 2024). Peningkatan literasi investasi diharapkan dapat mendorong tumbuhnya minat masyarakat untuk berinvestasi emas sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Minat investasi merupakan faktor penting yang menentukan keputusan seseorang dalam melakukan investasi. Menurut teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), minat seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan persepsi terhadap suatu objek investasi (Ajzen, 2020). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat literasi investasi yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk melakukan investasi emas syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran Bullion Bank dalam Meningkatkan Literasi dan Minat Investasi Emas Syariah pada Masyarakat di Kota Serang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi Bullion Bank dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi emas syariah serta pengaruhnya terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi dalam mengembangkan strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Bullion Bank

Bullion Bank atau Bank Emas merupakan lembaga jasa keuangan yang menyediakan berbagai layanan berbasis emas, seperti penyimpanan emas, perdagangan emas, pembiayaan berbasis emas, hingga investasi emas. Kehadiran

Bullion Bank bertujuan untuk mengintegrasikan emas sebagai bagian dari sistem keuangan formal sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih produktif oleh masyarakat (Bank Indonesia, 2024). Dalam konteks ekonomi syariah, Bullion Bank dapat menjadi sarana pengembangan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah karena emas merupakan salah satu aset yang memiliki nilai intrinsik dan diakui dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), layanan Bullion Bank diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui kemudahan akses investasi emas yang aman, transparan, dan terjangkau. Selain itu, Bullion Bank juga berperan dalam mengoptimalkan cadangan emas masyarakat yang selama ini masih banyak disimpan secara konvensional.

Menurut Yusuf dan Hidayat (2024), peran Bullion Bank dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Edukasi dan sosialisasi investasi emas.
2. Kemudahan akses layanan investasi emas.
3. Keamanan transaksi dan penyimpanan emas.
4. Inovasi produk investasi emas syariah.
5. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (OJK, 2024). Literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, termasuk dalam kegiatan investasi.

Menurut Remund (2019), literasi keuangan mencakup pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Dalam perspektif syariah, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek keuntungan ekonomi tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap transaksi keuangan.

Investasi Emas Syariah

Investasi emas syariah merupakan kegiatan penanaman dana dalam bentuk emas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Emas dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif aman karena nilainya cenderung stabil dan mampu melindungi kekayaan dari inflasi (Karim, 2021).

Menurut Ascarya dan Yumanita (2022), investasi emas syariah harus memenuhi ketentuan akad yang jelas, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta dilakukan secara transparan antara pihak yang bertransaksi. Investasi emas syariah dapat dilakukan melalui pembelian emas fisik maupun tabungan emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah.

Minat Investasi

Minat investasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan investasi setelah memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai instrumen investasi tertentu. Menurut Ajzen (2020), minat merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil keputusan.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa minat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku. Semakin positif sikap seseorang terhadap investasi serta semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, maka semakin besar pula minat untuk melakukan investasi (Ajzen, 2020).

Hubungan Bullion Bank dengan Literasi Keuangan Syariah

Bullion Bank memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi investasi emas. Semakin intensif edukasi yang diberikan oleh Bullion Bank, semakin tinggi pula pemahaman masyarakat mengenai investasi emas syariah (Yusuf & Hidayat, 2024).

Penelitian Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bullion Bank dalam meningkatkan literasi dan minat investasi emas syariah pada masyarakat di Kota Serang. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan masyarakat Kota Serang dan telah mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai investasi emas. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan aplikasi statistik.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia produktif 21–40 tahun sebesar 62%, berjenis kelamin perempuan sebesar 55%, dan memiliki pendidikan minimal SMA/ sederajat sebesar 78%. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki potensi untuk menjadi investor emas syariah karena berada pada kelompok usia yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan penggunaan layanan keuangan digital.

Pengaruh Peran Bullion Bank terhadap Literasi Keuangan Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Bullion Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah masyarakat Kota Serang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien regresi positif sebesar 0,645.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik peran Bullion Bank dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta kemudahan akses layanan investasi emas syariah, maka semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan syariah masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan Bullion Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan investasi emas, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep investasi syariah, manfaat investasi emas, serta mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Investasi Emas Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi emas syariah dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($< 0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,587.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai investasi emas syariah cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk melakukan investasi. Pengetahuan

mengenai manfaat investasi emas, risiko investasi, serta kesesuaian investasi dengan prinsip syariah menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi.

Pengaruh Peran Bullion Bank terhadap Minat Investasi Emas Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Bullion Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi emas syariah masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,701.

Hasil ini menunjukkan bahwa program edukasi, promosi, inovasi layanan digital, serta jaminan keamanan yang diberikan Bullion Bank mampu meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan digital marketing pada UMKM di Kota Serang berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari tingginya pemanfaatan berbagai platform digital seperti WhatsApp Business, Instagram, TikTok, Facebook, dan marketplace sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Digital marketing dinilai mampu memberikan kemudahan dalam menjangkau konsumen, menyampaikan informasi produk, serta meningkatkan interaksi dengan pelanggan.

Tingkat penjualan UMKM di Kota Serang menunjukkan peningkatan yang cukup baik setelah memanfaatkan digital marketing. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya volume penjualan, frekuensi pembelian, serta pendapatan usaha yang diperoleh pelaku UMKM.

Hasil analisis regresi linear sederhana

menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 7,845 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM di Kota Serang dapat diterima.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,521 menunjukkan bahwa digital marketing mampu menjelaskan pengaruh terhadap peningkatan penjualan UMKM sebesar 52,1%, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kualitas produk, harga, pelayanan, inovasi produk, dan kondisi pasar.

Peran Literasi Keuangan Syariah sebagai Variabel Mediasi

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mampu memediasi pengaruh peran Bullion Bank terhadap minat investasi emas syariah. Nilai indirect effect lebih besar dibandingkan nilai standar minimum yang ditetapkan sehingga menunjukkan adanya pengaruh mediasi yang signifikan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan minat investasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi secara langsung oleh keberadaan Bullion Bank, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap investasi emas syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–

324.

- Ascarya, & Yumanita, D. (2022). *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fahmi, I. (2021). *Pengantar Pasar Modal dan Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, T. (2021). *Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion*. Jakarta: OJK.
- Rahman, F. (2023). Analisis Minat Masyarakat terhadap Investasi Emas Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145–158.
- Sari, N., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Investasi Emas. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 55–68.
- Tandio, T., & Widanaputra, A. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender dan Kemajuan Teknologi pada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2316–2341.
- Wahyudi, R., & Prasetyo, A. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Investasi

- Masyarakat. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(3), 287–301.
- Yusuf, M., & Hidayat, R. (2024). Peran Edukasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Investasi Masyarakat. Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 10(1), 88–102.
- Bank Syariah Indonesia Annual Report 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). Laporan Tahunan 2024. Jakarta: BSI.
- Zubair, M., & Hamzah, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi terhadap Minat Investasi Emas Syariah. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, 4(2), 97–112.

PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2020-2022

Muhammad Saleh¹

salehqifar@gmail.com

Meilani Dwi Saputri²

meilaniidwis31@gmail.com

Komarudin³

komarudin@staikha.ac.id

Universitas Bina Bangsa¹⁻²

Sekolah Tinggi Agama Islam KH.Abdul Kabier³

ABSTRACT

The study employs a quantitative, associative-causal research method. The population consists of 87 property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), with a sample of 46 companies selected using purposive sampling. The test results indicate that for the Current Ratio variable, the value was 0.462 (< 1.96) and the p-value was 0.644 (> 0.05), meaning the Current Ratio has no influence on stock prices. For the Net Profit Margin variable, the value was 0.017 (< 1.96) and the p-value was 0.986 (> 0.05), meaning the Net Profit Margin has no influence on stock prices. For the Earnings Per Share variable, the value was 4.947 (> 1.96) and the p-value was 0.000 (< 0.05), meaning Earnings Per Share does influence stock prices. The adjusted R-squared value was 0.261 (26.1%), indicating that the Current Ratio, Net Profit Margin, and Earnings Per Share, when considered together, do not influence stock prices.

Keywords: Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Earnings Per Share (EPS)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif kausal dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan 87 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 46 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian yaitu nilai signifikan untuk variabel Current Ratio sebesar $0,462 < 1,96$ dan P-Values $0,644 > 0,05$, maka Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Nilai signifikan untuk variabel Net Profit Margin sebesar $0,017 < 1,96$ dan P-Values $0,986 > 0,05$, maka Net Profit Margin tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Nilai signifikan untuk variabel Earning Per Share sebesar $4,947 > 1,96$ dan P-Values $0,000 < 0,05$, maka Earning Per Share memiliki pengaruh terhadap harga saham. Untuk uji R-Square adjusted memiliki nilai 0,261 yang artinya 26,1%, maka Current Ratio, Net Profit Margin dan Earning Per Share secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham.

Kata Kunci : Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Investasi dalam pasar modal kini menjadi aktivitas alternatif untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemenuhan kebutuhan seseorang. Perusahaan yang baik harus memiliki kriteria kenaikan yang baik di pasar modal, dan biasanya sebelum membeli saham calon investor akan menganalisa kondisi keuangan perusahaan untuk mempertimbangkan perusahaan mana yang baik yang akan dibeli saham nya.

Perusahaan Properti dan *Real Estate* merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan merupakan salah satu sektor terpenting dalam suatu negara dan merupakan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang dan akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi serta diyakini merupakan salah satu investasi yang menjanjikan. Produk yang dihasilkan Properti dan *Real Estate* berupa perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran yang membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya.

Harga saham juga menggambarkan nilai perusahaan, apabila harga saham perusahaan tinggi atau meningkat, maka investor menilai perusahaan itu baik dan begitupun sebaliknya, oleh karena itu harga saham merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan.

Current Ratio (CR) menjadi salah satu rasio yang dapat dijadikan indikator tingkat likuiditas. Semakin tinggi *Current Ratio* (CR) maka semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya.

Rendahnya nilai *Net Profit Margin* (NPM) disebabkan karena tingginya biaya

yang harus ditanggung oleh perusahaan yang disebabkan karena tidak efesienya operasi perusahaan. Maka semakin besar *Net Profit Margin* (NPM) berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mnengeluarkan biaya-biaya.

Besarnya *Earning Per Share* (EPS) suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Jika nilai laba per saham kecil maka kecil pula kemungkinan perusahaan untuk membagikan deviden.

TINJAUAN PUSTAKA

Harga Saham

Harga saham adalah harga pada suatu saham yang diperjual belikan di pasar modal, dengan adanya permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar dan dimana harga tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Indikator yang digunakan dalam tolak ukur harga saham adalah harga yang dapat dilihat dari harga penutupan (*closing price*) yang terbentuk melalui proses permintaan dan penawaran di pasar bursa antara penjual dan pembeli pada saat akhir bursa. Jika pasar bursa sudah tutup, maka harga saham adalah harga penutupannya (*closing price*).

Current Ratio (CR)

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah perbandingan antara total aset lancar dengan total hutang lancar pada periode tertentu yang membantu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang jatuh tempo.

Indikator *Current Ratio* (CR)

Kondisi perusahaan yang memiliki *Current Ratio* (CR) yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan

bagus, namun jika *Current Ratio* (rasio lancar) terlalu tinggi juga dianggap tidak baik. Rumus *Current Ratio* (CR) sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan laba yang diperoleh oleh perusahaan setelah pajak.

Indikator *Net Profit Margin* (NPM)

Dengan mengukur margin laba tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Maka dari itu investor harus memperhatikan *Net Profit Margin* (NPM) karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *Net Profit Margin* (NPM) sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

Earning Per Share (EPS)

Earning Per Share (EPS) adalah pendapatan atau keuntungan tiap per lembar saham yang akan diperoleh pemegang saham.

Indikator Earning Per Share (EPS)

Earning Per Share (EPS) merupakan besarnya laba per saham yang diperoleh oleh pemegang saham atas saham yang dimiliki selama suatu periode. Maka semakin besar laba, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membagikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Rumus *Earning Per Share* (EPS) sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Pendapatan Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kausalitas metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu meliputi tiga variabel. Ketiga variabel tersebut adalah variabel dependen yaitu harga saham serta variabel independen yaitu *Current Ratio* (CR), *Net Profit Margin* (NPM) dan *Earning Per Share* (EPS).

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode waktu penelitian yaitu periode 2020 sampai dengan 2022. Dengan jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 87 perusahaan.

Sampel

Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan kriteria maka didapatkan sampel sebanyak 46 perusahaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode proses pengolahan data yang mencakup perhitungan data analisis model penelitian. Sebelum membuat kesimpulan dalam suatu penelitian analisis terhadap data harus dilakukan agar hasil penelitian menjadi akurat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program SmartPLS 4.

Metode Parsial Least Square (PLS)

Menurut Jogiyanto, analisis data dilakukan dengan metode Parsial Least Square (PLS). PLS adalah Teknik statistik multi varian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dengan variabel independent berganda. PLS adalah

salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda. Ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan multikolonieritas. Analisis kuantitatif penelitian disertai ini memakai pendekatan analisis Parsial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS) yang kemampuan menjelaskan hubungan antara beberapa variabel (termasuk juga variabel laten) serta berkemampuan melakukan analisis faktor, analisis regresi dan analisis jalur dalam sekali pengujian.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memprediksikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Statistik deskriptif menjelaskan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel.

Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial atau sering disebut juga statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software smartPLS (Parsial Least Square) mulai dari pengukuran model (outermodel), struktur modal (innermodal) dan pengujian hipotesis. PLS (Partial Least Square) menggunakan metode principle componen analysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstrasi varian

untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (common variance), varian spesifik (spesifik variance), dan varian error (error variance) sehingga total varian menjadi tinggi.

Spesifikasi Model

1. Model Struktural (Inner Model)

Inner model merupakan model structural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui boot straping, parameter uji T-Statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model structural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk variabel dependen, Stone-Geisser, Q-Square test untuk predictive relevance. Bila ini R-Square lebih besar dari 0.2 maka dapat diinterpretasikan bahwa predictor laten memiliki pengaruh besar pada level structural.

2. Predictive Relevance

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0,05 memperlihatkan bahwa nilai model konstruk baik, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0,05 memperlihatkan bahwa nilai model konstruk tidak baik. Untuk mengukur Q-square menggunakan metode Blind folding pada software SmartPLS versi 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, dengan menggunakan data tahunan.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Current Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Earning Per Share* terhadap Harga Saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data dari laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id.

Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, ukuran data statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum (min), nilai maksimum (max) dan standar deviasi. Statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Kinerja Karyawan

Menurut Sutrisno dalam (Darsana & Wardana, 2023:60) mengemukakan kinerja karyawan adalah prestasi yang diperoleh seseorang dalam melakukan tugas, oleh karena itu keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tergantung dari seberapa baik kinerja karyawan yang dimiliki. Aaker (1997) juga mengemukakan piramida untuk mengukur Brand awareness (kesadaran merek) dari tingkat terendah hingga paling tinggi adalah.

Menurut Sutrisno dalam (Harahap & Tirtayasa, 2020) bahwa terdapat lima indikator kinerja karyawan yaitu :

1. Hasil kerja, yaitu meliputi tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan.
2. Pengetahuan pekerjaan, yaitu pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan hasil kerja.

3. Inisiatif, yaitu tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.
4. Sikap yaitu semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
5. Disiplin waktu dan absensi yaitu ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
CR	0,00	-0,210	-0,240	6,822	1,000
NPM	0,00	-0,253	-0,362	8,024	1,000
EPS	0,00	-0,334	-0,360	5,611	1,000
Harga Saham	0,00	-0,253	-0,288	7,277	1,000

Sumber: hasil olah data software SmartPLS4

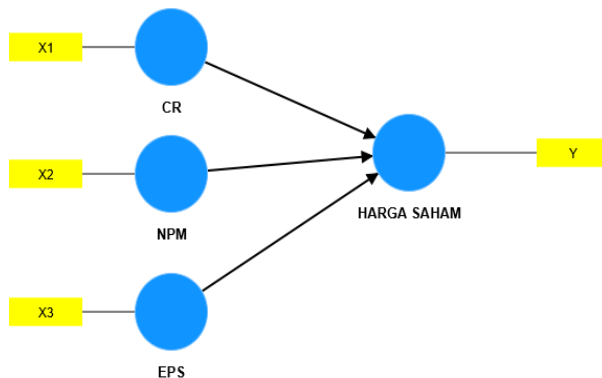
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah data pengamatan sebanyak 138 data dengan variabel-variabel terkait sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang berasal dari data variabel *Current Ratio* (CR) menunjukkan hasil sebesar 0,00, nilai median (0,210), nilai minimum (0,240), nilai maksimum 6,822, dan nilai standar deviasi 1,000.
2. Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang berasal dari variabel *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan hasil sebesar 0,00, nilai median (0,253), nilai minimum (0,362), nilai maksimum 8,024, dan nilai standar deviasi 1,000.
3. Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang berasal dari variabel *Earning Per Share* (EPS) menunjukkan hasil sebesar 0,00, nilai median (0,334), nilai minimum (0,360), nilai maksimum 5,611, dan nilai standar deviasi 1,000.
4. Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang berasal dari variabel harga saham

menunjukkan hasil sebesar 0,00, nilai median (0,253), nilai minimum (0,288), nilai maksimum 7,277, dan nilai standar deviasi 1,000.

Pengujian Analisis

Untuk menganalisis data digunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS) versi 4, cocok untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten dengan multiple indikator dan dapat membantu mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. Evaluasi dalam SmartPLS terdiri dari evaluasi outer model (model pengukuran) dan evaluasi inner model (model struktural).



Gambar 4.1 Output SmartPLS Algorithm

Pembahasan Hasil Penelitian

R-Square

	R-square	R-square adjusted
HARGA SAHAM	0,277	0,261

Dapat dilihat dari bahwa nilai R-Square adjusted konstruk harga saham (Y) sebesar 0,261. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Current Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Earning Per Share* tidak berpengaruh terhadap harga saham sebesar 26,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

F-Square

	f-square
CR -> HARGA SAHAM	0,001
EPS -> HARGA SAHAM	0,377
NPM -> HARGA SAHAM	0,000

Dapat dilihat bahwa *Current Ratio* terhadap harga saham memiliki pengaruh sebesar 0,001 yang berarti memiliki pengaruh yang kecil terhadap harga saham, sedangkan *Net Profit Margin* terhadap harga saham memiliki pengaruh sebesar 0,000 yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Dan *Earning Per Share* terhadap harga saham memiliki pengaruh sebesar 0,377 yang berarti memiliki pengaruh yang besar/moderat.

a. Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
CR -> HARGA SAHAM	-0,023	-0,025	0,051	0,462	0,644
EPS -> HARGA SAHAM	0,524	0,531	0,106	4,947	0,000
NPM -> HARGA SAHAM	-0,001	-0,003	0,087	0,017	0,986

Dapat dilihat hasil Path Coefficients menunjukkan bahwa *Current Ratio* (CR) terhadap harga saham menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar -0,023 berpengaruh negatif, dengan nilai t-statistik 0,462 < 1,96 dan nilai signifikansi p-values sebesar 0,644 > 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini berarti menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara langsung *Current Ratio* (CR) terhadap Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar -0,001 berpengaruh negatif, dengan nilai t-statistik 0,017 < 1,96 dan nilai signifikan p-values sebesar 0,986 > 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh secara

langsung *Net Profit Margin* (NPM) terhadap Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham menunjukkan nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,524 berpengaruh positif, dengan nilai t-statistik $4,947 > 1,96$ dan nilai signifikansi p-values sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh secara langsung *Earning Per Share* (EPS) terhadap Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI.

PENUTUP

kesimpulan

1. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan antara *Current Ratio* (CR) terhadap Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini dapat dilihat dari hasil path coefficients *Current Ratio* sebesar -0,023, dengan nilai t-statistik $0,462 < 1,96$ dan nilai signifikansi p-values sebesar $0,644 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan antara *Net Profit Margin* (NPM) terhadap Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini dapat dilihat dari hasil path coefficients *Net Profit Margin* sebesar -0,001, dengan nilai t-statistik $0,017 < 1,96$ dan nilai signifikansi p-values sebesar $0,986 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Dari hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Earning Per Share* (EPS) terhadap

Harga Saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini dapat dilihat dari hasil path coefficients *Earning Per Share* sebesar 0,524, dengan nilai t-statistik $4,947 > 1,96$ dan nilai signifikansi p-values sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4. Dari hasil pengujian menunjukkan tidak berpengaruh antara *Current Ratio* (CR), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Earning Per Share* (EPS) secara bersama-sama terhadap harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini dapat dilihat dari hasil R-Square adjusted sebesar 0,261 artinya 26,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliwar. (2014). *Buku Ajar Statistik Dasar*. Jakarta Timur.
- Dharmawan. (2020). *Dasar-dasar Memahami Rasio Laporan Keuangan*. Yogyakarta.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauji, A. (n.d.). *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS 3.3.9*.
- Resmiyanto, R. (2014). *Nalar Fisika Di Pasar Saham*. Klaten.
- Sunyoto, D. (2020). *Manajemen Keuangan Untuk Perusahaan*. Yogyakarta.
- Umam, K., & Susanto, H. (2012). *Manajemen Investasi*. Bandung.
- Alfianti, D., & Andarini, S. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Indonesia*, Vol. 8, No. 1.

- Anshari, B. (2016). Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Di Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Batubara, H. C., & Purnama, N. I. (2018). Pengaruh Current Ratio, Return On Equity, Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia . *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Charullina, V., Buniarto, E. A., & Arida, R. W. (2023). Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Assets (ROA), Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham . *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol. 1, No. 1.
- Firmansyah, B., & Hidayati, A. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Harga Saham Dan Earning Per Share Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 Periode 2018-2021. *Jurnal Ekbis Dewantara*, Vo. 6, No. 1.
- Jayanti, F. D. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 3, No.2 , 34-44.
- Lestari, S. I., & Yudiantoro, D. (2023). Pengaruh Return On Assets, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share, Price to Book Value Terhadap Harga Saham Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Ekonomika Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 12, No. 1.
- Nalsal, P., & Herlinasih. (2017). Pengaruh Debt to Equity Ratio Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2.
- Putri, G. E. (1-11). Pengaruh Current Ratio (CR), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) Dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.
- Siregar, S. A. (2022). Pengaruh Return On Assets (ROA), Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Bussiness and Management*, Vol. 2, No.1, 113-125.

AKURASI ALOKASI BIAYA OVERHEAD MENGGUNAKAN ACTIVITY-BASED COSTING (ABC) PADA UMKM BAKSO IKAN: STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF AKUNTANSI TRADISIONAL DAN SYARIAH

Robin Mulyadi Wijaya
robinwijay403@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Lampung

ABSTRACT

This study aims to analyze various overhead allocation methods in cost accounting, including machine hours, direct labor hours, direct labor costs, direct material costs, and the Activity-Based Costing (ABC) approach. The results indicate that traditional methods remain relevant for companies with simple production structures but tend to result in cost distortions for companies with high levels of complexity. Conversely, the ABC method proves to be more accurate as it utilizes various cost drivers aligned with specific activities, thereby mitigating the risk of overcosting or undercosting. Consequently, the selection of an overhead allocation method must be tailored to the company's characteristics to ensure that the resulting cost information effectively supports managerial decision-making.

Keywords: *Overhead Costs, Traditional Methods, Activity-Based Costing, Cost Accuracy, Sharia Banking*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode pembebanan biaya overhead dalam akuntansi biaya, meliputi metode jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, serta pendekatan Activity-Based Costing (ABC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional masih relevan untuk perusahaan dengan struktur produksi sederhana, namun cenderung menghasilkan distorsi biaya pada perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi. Sebaliknya, metode ABC terbukti lebih akurat karena menggunakan berbagai *cost driver* yang sesuai dengan aktivitas, sehingga mampu mengurangi risiko overcosting maupun undercosting. Dengan demikian, pemilihan metode pembebanan overhead harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan agar informasi biaya yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efektif.

Kata kunci: *Biaya Overhead, Metode Tradisional, Activity-Based Costing, Akurasi Biaya, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan dunia industri dan jasa modern telah membawa perubahan signifikan dalam struktur biaya perusahaan. Di masa lalu, biaya produksi sebagian besar terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku, sehingga metode tradisional pemuatan overhead berdasarkan tenaga kerja atau bahan baku dianggap memadai. Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, otomatisasi, robotika, dan sistem informasi, proporsi biaya overhead menjadi lebih besar daripada biaya tenaga kerja langsung. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam akuntansi biaya, terutama dalam hal keakuratan pengisian overhead terhadap produk atau layanan. Menurut Datar dan Rajan (2023), hubungan antara tenaga kerja langsung dan biaya overhead semakin lemah, sehingga metode tradisional sering menghasilkan informasi biaya yang kurang akurat. Hal ini berdampak pada penetapan harga jual, pengukuran profitabilitas, pengendalian biaya, dan perencanaan strategis perusahaan.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengevaluasi berbagai metode pengisian biaya overhead, baik metode tradisional maupun pendekatan modern seperti Activity-Based Costing (ABC). Metode tradisional yang umum digunakan termasuk metode jam kerja mesin, jam kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku langsung. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada karakteristik perusahaan. Misalnya, metode jam kerja mesin cocok untuk perusahaan dengan tingkat otomatisasi tinggi, sedangkan metode jam kerja langsung lebih relevan untuk industri padat karya. Namun, pada perusahaan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan produk yang beragam, metode tradisional cenderung

menyebabkan distorsi biaya, baik dalam bentuk overcosting maupun undercosting. Distorsi biaya ini dapat mengakibatkan keputusan manajerial yang tidak tepat, seperti menetapkan harga jual yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga mempengaruhi daya saing dan profitabilitas perusahaan (Hansen, Mowen, & Heitger, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai metode pengisian biaya overhead, serta menilai relevansinya dalam konteks industri modern dan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan Activity-Based Costing sebagai alternatif yang lebih akurat dalam pengisian overhead. Dengan menggunakan pendekatan komparatif berbasis literatur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas masing-masing metode dalam menghasilkan informasi biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami konsep overhead charging tidak hanya untuk perusahaan manufaktur, tetapi juga untuk sektor jasa, termasuk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sánchez-Rebull et al. (2023) yang menyatakan bahwa ABC merupakan salah satu inovasi terpenting dalam akuntansi biaya karena mampu meningkatkan akurasi informasi biaya secara signifikan.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis komparatif berbagai metode overhead loading. Analisis ini mencakup evaluasi aspek kemudahan implementasi, biaya implementasi, akurasi, relevansi dengan struktur biaya perusahaan, dan potensi distorsi biaya. Tinjauan literatur digunakan sebagai dasar argumen untuk mendukung perlunya penelitian ini, dengan mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yang

membahas penerapan metode overhead loading dalam berbagai konteks industri. Misalnya, penelitian Firmandani, Fortuna, dan Nurul (2024) menunjukkan bahwa penerapan ABC mampu menangkap kompleksitas proses manufaktur lebih baik daripada metode tradisional. Sementara itu, penelitian Yulianto dan Prasetyo (2024) menekankan bahwa ABC lebih cocok untuk industri manufaktur modern yang memiliki beragam produk dan aktivitas yang kompleks. Dengan demikian, tinjauan literatur ini menjadi dasar untuk pengembangan hipotesis bahwa Activity-Based Costing lebih akurat daripada metode tradisional pengisian overhead.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa penerapan Activity-Based Costing menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat daripada metode tradisional, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial dengan lebih efektif. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan produk mengkonsumsi aktivitas, sehingga pengisian harus didasarkan pada aktivitas yang sebenarnya digunakan oleh produk tersebut. Dengan menggunakan berbagai cost driver yang sesuai dengan karakteristik aktivitas perusahaan, ABC mampu mengurangi risiko overcosting dan undercosting, serta meningkatkan relevansi informasi cost terhadap manajemen (Kaplan & Anderson, 2023; Zha, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi penerapan konsep overhead charging dalam konteks perbankan syariah. Meskipun bank syariah tidak memproduksi produk manufaktur, prinsip alokasi biaya tetap penting untuk menghitung biaya layanan, mengukur profitabilitas produk pembiayaan, mengevaluasi efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aktivitas,

bank syariah dapat mengidentifikasi kegiatan yang tidak bernilai tambah, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan ABC di lembaga keuangan mampu meningkatkan akurasi pengukuran biaya layanan dan profitabilitas produk.

Secara keseluruhan, pengantar ini menegaskan bahwa penelitian tentang metode pengisian biaya overhead memiliki urgensi tinggi dalam konteks bisnis modern. Perubahan struktur biaya perusahaan karena perkembangan teknologi dan otomatisasi menuntut metode pengisian overhead yang lebih akurat dan relevan. Dengan mengintegrasikan hasil tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis, penelitian ini berupaya berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi biaya dan penerapannya di berbagai sektor industri dan jasa, termasuk perbankan syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui Akurasi Alokasi Biaya Overhead Menggunakan Activity-Based Costing (ABC) pada UKM Bakso Ikan: Studi Komparatif Perspektif Akuntansi Konvensional dan Syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode studi literatur dan studi kasus pada UMKM Bakso Ikan “Sumber Rezeki” di Bandar Lampung. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas berbagai metode pembebanan biaya overhead dalam menentukan Harga Pokok Produksi (HPP) secara akurat dan efisien. Desain penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur untuk mengidentifikasi teori serta hasil penelitian terdahulu, dan studi kasus lapangan untuk

menguji penerapan praktis metode pembebanan overhead dengan data produksi nyata. Objek penelitian adalah UMKM Bakso Ikan “Sumber Rezeki” yang memiliki kapasitas produksi rata-rata 100 kg per hari dengan aktivitas utama berupa penggilingan ikan, pencampuran bahan, pencetakan, perebusan, dan pengemasan. UMKM ini dipilih karena memiliki karakteristik produksi semiotomatis dengan struktur biaya sederhana namun relevan untuk analisis overhead.

Bahan penelitian meliputi data biaya produksi UMKM (bahan baku, tenaga kerja, overhead) serta literatur akademik (80% jurnal, 20% buku teks). Alat yang digunakan adalah komputer dengan Microsoft Excel untuk simulasi perhitungan, tabel komparatif, dan bagan metodologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas produksi dan penggunaan mesin, wawancara untuk memperoleh informasi struktur biaya dan sistem pencatatan keuangan, dokumentasi berupa data biaya produksi dan laporan keuangan sederhana, serta studi literatur terkait metode pembebanan overhead.

Definisi operasional variabel meliputi: biaya overhead sebagai biaya tidak langsung (listrik, depresiasi mesin, bahan penunjang, inspeksi), metode tradisional (berbasis jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, atau biaya bahan baku), metode Activity-Based Costing (ABC) yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas dengan cost driver tertentu, serta UMKM Bakso Ikan sebagai usaha mikro dengan sistem produksi semiotomatis.

Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil pembebanan overhead dari lima metode, yaitu:

a) Metode jam kerja mesin, dengan tarif

- Rp20.000/jam menghasilkan overhead Rp1.000.000 per batch;
- b) Metode jam tenaga kerja langsung, dengan tarif Rp15.000/jam menghasilkan overhead Rp900.000 per batch;
- c) Metode biaya tenaga kerja langsung, dengan tarif 50% dari biaya tenaga kerja menghasilkan overhead Rp1.000.000 per batch;
- d) Metode biaya bahan baku langsung, dengan tarif 40% dari biaya bahan baku menghasilkan overhead Rp1.200.000 per batch; dan
- e) Metode *Activity-Based Costing* (ABC), dengan identifikasi aktivitas (penggilingan, pencetakan, perebusan, pengemasan) menghasilkan overhead Rp1.550.000 per batch.

Teknik analisis meliputi perhitungan HPP per batch dengan masing-masing metode, perbandingan akurasi dan relevansi terhadap aktivitas produksi, evaluasi distorsi biaya (overcosting dan undercosting), serta penentuan metode yang paling sesuai dengan karakteristik UMKM. Kesimpulan metodologis menunjukkan bahwa metode ABC memberikan informasi biaya yang paling akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam penentuan harga jual dan efisiensi produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Bakso Ikan “Sumber Rezeki” di Bandar Lampung dengan tujuan mengevaluasi efektivitas berbagai metode pembebanan biaya overhead. Data biaya produksi yang dianalisis mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, dengan perhitungan menggunakan lima metode yaitu jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya

bahan baku langsung, serta Activity-Based Costing (ABC).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode jam kerja mesin menghasilkan overhead sebesar Rp1.000.000 per batch dengan akurasi sedang dan sesuai untuk aktivitas berbasis mesin. Metode jam tenaga kerja langsung menghasilkan Rp900.000 per batch dengan akurasi sedang dan relevan untuk aktivitas manual. Metode biaya tenaga kerja menghasilkan Rp1.000.000 per batch dengan akurasi rendah karena berpotensi menimbulkan distorsi biaya. Metode biaya bahan baku menghasilkan Rp1.200.000 per batch dengan akurasi rendah karena tidak mencerminkan overhead aktual. Sementara itu, metode Activity-Based Costing (ABC) menghasilkan Rp1.550.000 per batch dengan akurasi tinggi karena berbasis aktivitas dan lebih mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya.

Diskusi penelitian menunjukkan bahwa metode tradisional masih dapat digunakan pada UMKM dengan struktur biaya sederhana, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas aktivitas produksi. Metode jam kerja mesin dan jam tenaga kerja langsung relatif lebih akurat dibandingkan metode berbasis biaya tenaga kerja atau bahan baku, karena keduanya memiliki hubungan yang lebih jelas dengan konsumsi overhead. Namun demikian, keduanya tetap menimbulkan distorsi biaya ketika aktivitas non-mesin atau aktivitas pendukung tidak diperhitungkan (Hansen, Mowen, & Heitger, 2024). Sebaliknya, metode Activity-Based Costing (ABC) memberikan hasil yang lebih realistis karena memperhitungkan aktivitas spesifik yang dikonsumsi produk. Dalam kasus UMKM Bakso Ikan, ABC menunjukkan overhead sebesar Rp1.550.000 per batch, lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Hal ini mencerminkan bahwa produk bakso ikan membutuhkan aktivitas tambahan seperti

pengemasan dan inspeksi yang tidak tercermin dalam metode tradisional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmadani, Fortuna, dan Nurul (2024) yang menekankan bahwa ABC mampu menangkap kompleksitas proses manufaktur secara lebih baik.

Selain itu, penerapan ABC pada UMKM Bakso Ikan juga relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi biaya yang akurat membantu pemilik usaha dalam menentukan harga jual yang kompetitif, mengendalikan biaya produksi, serta mengevaluasi profitabilitas produk. Hal ini sesuai dengan pandangan Sánchez-Rebull, Niñerola, dan Hernández-Lara (2023) yang menyatakan bahwa ABC merupakan inovasi penting dalam akuntansi biaya karena mampu meningkatkan akurasi informasi biaya secara signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab permasalahan utama yaitu bagaimana memilih metode pembebanan overhead yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Metode tradisional dapat digunakan untuk usaha dengan aktivitas sederhana, namun untuk UMKM yang mulai menggunakan mesin dan memiliki aktivitas beragam, Activity-Based Costing lebih disarankan karena mampu mengurangi risiko overcosting dan undercosting (Zha, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan berbagai metode pembebanan biaya overhead memberikan hasil yang berbeda dalam menentukan akurasi harga pokok produksi pada UMKM Bakso Ikan “Sumber Rezeki”. Metode tradisional seperti jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku masih relevan untuk usaha dengan struktur produksi sederhana, namun memiliki keterbatasan dalam menggambarkan konsumsi sumber

daya yang kompleks. Sementara itu, metode Activity-Based Costing (ABC) terbukti memberikan hasil yang lebih akurat karena mampu mengaitkan biaya dengan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ABC pada UMKM tidak hanya meningkatkan akurasi informasi biaya, tetapi juga membantu pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dalam menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi profitabilitas produk. Dalam konteks Hukum Islam, prinsip keadilan dan transparansi dalam penentuan harga pokok produksi tercermin melalui penerapan metode pembebanan biaya yang adil dan proporsional terhadap konsumsi sumber daya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah seperti al-‘adl (keadilan) dan amanah (kejujuran) dalam muamalah, yang menuntut agar setiap transaksi mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi biaya.

Selain itu, dari perspektif Hukum Adat Islam, penerapan sistem pembebanan biaya yang akurat mencerminkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kepercayaan sosial dalam kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM yang menerapkan sistem biaya berbasis aktivitas dapat lebih transparan dalam menentukan harga jual, sehingga memperkuat kepercayaan antara produsen dan konsumen sebagai bagian dari etika bisnis Islami.

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi biaya berbasis syariah dengan menegaskan bahwa metode pembebanan overhead yang tepat tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan moral dalam praktik bisnis. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah memperluas kajian penerapan Time-

Driven Activity-Based Costing (TDABC) pada sektor UMKM berbasis syariah untuk mengukur efisiensi waktu dan biaya secara lebih komprehensif, serta mengkaji integrasi sistem pembebanan biaya dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam pengelolaan keuangan Islam kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar ilmiah dan praktis bagi pengembangan sistem akuntansi biaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan adat lokal, serta membuka ruang bagi inovasi metodologis yang mendukung keberlanjutan ekonomi umat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa penerapan berbagai metode pembebanan biaya overhead pada UMKM Bakso Ikan “Sumber Rezeki” menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda dalam menentukan harga pokok produksi. Metode tradisional seperti jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku masih relevan untuk usaha dengan struktur produksi sederhana, namun memiliki keterbatasan dalam menggambarkan konsumsi sumber daya yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan distorsi biaya. Sebaliknya, metode Activity-Based Costing (ABC) terbukti lebih akurat karena mampu mengaitkan biaya dengan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya, sehingga dapat mengurangi risiko overcosting maupun undercosting.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ABC tidak hanya meningkatkan akurasi informasi biaya, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat dalam penentuan harga jual, pengendalian biaya, dan evaluasi profitabilitas produk. Dalam

perspektif Hukum Islam, penerapan metode pembebanan biaya yang adil dan proporsional mencerminkan nilai keadilan (al-‘adl) dan amanah dalam muamalah, sehingga setiap transaksi mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa manipulasi. Dari sisi Hukum Adat Islam, sistem biaya berbasis aktivitas juga mencerminkan nilai gotong royong dan kepercayaan sosial, memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen dalam etika bisnis Islami.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan akuntansi biaya berbasis syariah dengan menegaskan bahwa pemilihan metode pembebanan overhead yang tepat tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan moral dalam praktik bisnis. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah mengkaji penerapan Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) pada sektor UMKM berbasis syariah untuk mengukur efisiensi waktu dan biaya secara lebih komprehensif, serta mengintegrasikan sistem pembebanan biaya dengan prinsip maqāsid al-sharī‘ah dalam pengelolaan keuangan Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Datar, S. M., & Rajan, M. V. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 18th ed. Pearson, 2023.
- Drury, C. *Management and Cost Accounting*. 11th ed. Cengage Learning, 2023.
- Firmandani, W., Fortuna, A. D., & Nurul, M. “Activity-Based Costing Implementation for Capturing the Complexity of Manufacturing Process.” *The International Journal of Applied Business* 8, no. 1 (2024): 45–58.
- Handayani, M., Rahmi, A. A., Aliza, Z., & Ali, Z. “Penerapan Metode Activity-Based Costing dalam Menentukan Biaya Overhead.” *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 3, no. 1 (2023): 19–26.
- Hansen, D. R., Mowen, M. M., & Heitger, D. L. *Cornerstones of Cost Management*. 6th ed. Cengage Learning, 2024.
- Hornigren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson Education, 2024.
- Kaplan, R. S., & Anderson, S. R. *Time-Driven Activity-Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits*. Harvard Business Review Press, 2023.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L. *Managerial Accounting: The Cornerstone of Business Decision-Making*. Cengage Learning, 2023.
- Pollari, A. *Developing a Time-Driven Activity-Based Costing System for Allocating Variable Manufacturing Overhead Costs to Products*. LUT University, 2024.
- Rajan, K., & Pillai, R. “Overhead Cost Allocation in Manufacturing Firms Using Activity-Based Costing Methodology.” *Global Perspectives in Management* 3, no. 2 (2025): 31–39.
- Saeed, A. M. M., Widyaningsih, A., & Khaled, A. S. D. “Activity-Based Costing (ABC) in the Manufacturing Industry: A Literature Review.” *Journal of Developing Economies* 8, no. 2 (2023): 77–91.
- Sánchez-Rebull, M. V., Niñerola, A., & Hernández-Lara, A. B. “After 30 Years, What Has Happened to Activity-Based Costing? A Systematic Literature Review.” *SAGE Open* 13, no. 2 (2023): 1–15.
- Supriyono. *Akuntansi Biaya dan Pengendalian Biaya*. BPFE Yogyakarta, 2023.

- Witjaksono, A. *Akuntansi Biaya*. Graha Ilmu, 2024.
- Yulianto, A., & Prasetyo, H. "Analisis Penerapan Activity-Based Costing pada Industri Manufaktur Modern." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 21, no. 1 (2024): 55–72.
- Zha, J. "Activity-Based Costing Method: A Study on Controlling Manufacturing Costs in Enterprises." *Journal of The Institution of Engineers (India): Series C* 105 (2024): 981–986.
- Al-Khatib, A., & Al-Hosani, M. "Cost Management Practices in Small and Medium Enterprises: Evidence from Emerging Markets." *International Journal of Business and Economics Research* 12, no. 3 (2023): 112–124.
- Rahman, M. A., & Karim, N. "Integrating Islamic Business Ethics into Cost Accounting Practices." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2024): 88–104.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. "Implementasi Activity-Based Costing pada UMKM Makanan Olahan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan* 10, no. 2 (2024): 45–60.
- Aliza, Z., & Rahmi, A. "Comparative Study of Traditional and Activity-Based Costing in Indonesian SMEs." *Asian Journal of Accounting Research* 8, no. 3 (2023): 210–225.
- Hasan, M., & Abdullah, M. "Islamic Perspectives on Fair Pricing and Cost Transparency." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9, no. 2 (2023): 55–70.
- Fauzi, R., & Pratama, H. "Cost Allocation Accuracy in Small Manufacturing Firms Using ABC." *Journal of Applied Accounting Research* 25, no. 1 (2025): 33–47.
- Nuraini, S., & Putra, D. "Activity-Based Costing and Its Impact on Profitability of SMEs." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 15, no. 1 (2024): 101–115.
- Khalid, A., & Yusuf, M. "The Role of Costing Systems in Enhancing Islamic Business Accountability." *Journal of Islamic Finance and Management* 7, no. 2 (2023): 89–102.
- Karim, N., & Rahman, M. "Activity-Based Costing as a Tool for Ethical Decision-Making in Islamic Enterprises." *Journal of Islamic Accounting and Finance Review* 6, no. 1 (2025): 22–38.

ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Fathurrahman

faturrahman@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Lampung

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of intellectual capital on corporate performance—specifically within the banking industry—with risk management serving as a moderating variable. Intellectual capital encompasses the knowledge, skills, and innovations expected to enhance corporate performance. Such improvements can be achieved through the upgrading of operational systems or the innovation of products and services offered by the company. However, given technological advancements, risk management has become crucial for addressing potential risks that could arise and affect corporate performance. The study utilizes secondary data, specifically annual reports and financial statements from banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period. Multiple regression analysis was employed to examine the relationship between intellectual capital and corporate performance, as well as the role of risk management in moderating this relationship. The findings indicate that intellectual capital and the moderating role of risk management have a significant empirical impact on financial performance.

Keywords: *Intellectual Capital, Corporate Performance, Risk Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan, khususnya di industri perbankan dengan manajemen risiko sebagai moderator. Modal intelektual sendiri mencakup pengetahuan, keterampilan, dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan sistem operasional atau inovasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, manajemen risiko menjadi penting untuk mengelola potensi risiko yang dapat timbul dan memengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode 2019-2023. Analisis ini dilakukan menggunakan regresi berganda untuk melihat hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan, serta peran manajemen risiko dalam memoderasi modal intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal intelektual dan peran moderasi manajemen risiko secara empiris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: Modal Intelektual, Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi sejak awal 1990-an. Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 1991, menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia. Kehadirannya merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Muslim yang menginginkan sistem keuangan bebas riba, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Karim, 2020). Sejak saat itu, lembaga keuangan syariah mulai berkembang, meskipun pada awalnya pertumbuhannya relatif lambat karena keterbatasan regulasi dan rendahnya literasi masyarakat.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional bank syariah, termasuk pengaturan produk, mekanisme pembiayaan, serta tata kelola. Menurut Ascarya (2019), regulasi tersebut mendorong pertumbuhan signifikan jumlah bank syariah dan unit usaha syariah dari bank konvensional. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 terdapat lebih dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan lebih dari 160 BPRS yang beroperasi di Indonesia.

Selain bank, koperasi syariah juga memainkan peran penting dalam memperluas akses keuangan. Koperasi syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan solidaritas, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat pedesaan. Menurut Putri & Syafruddin (2023), koperasi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat

yang tidak memiliki akses ke bank.

Perkembangan fintech syariah dalam satu dekade terakhir semakin memperkuat posisi keuangan syariah di Indonesia. Fintech syariah hadir dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan peer-to-peer berbasis akad syariah, tabungan digital, dan layanan pembayaran halal. Menurut Satrio & Nasution (2024), fintech syariah mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank konvensional maupun bank syariah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah berperan dalam memperluas akses layanan keuangan di Indonesia. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. **Menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.** Penelitian ini berfokus pada kontribusi bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta bagaimana produk-produk tersebut mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.
2. **Mengidentifikasi produk dan layanan syariah yang mendukung inklusi keuangan.** Penelitian ini akan menelaah berbagai instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro berbasis murabahah, mudharabah, musyarakah, tabungan wadiah,

deposito mudharabah, serta layanan digital berbasis fintech syariah, yang berperan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

3. **Menilai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan.**

Fokus penelitian mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di daerah rural, serta regulasi dan pengawasan yang masih perlu diperkuat.

4. **Menggali peluang pengembangan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.**

Penelitian ini akan mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi digital, integrasi dengan pasar modal syariah, serta strategi kebijakan pemerintah dan OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah.

5. **Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal yang bermanfaat, terjangkau, serta digunakan secara efektif untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi mereka. World Bank (2021) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses individu dan bisnis terhadap produk keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Di Indonesia, inklusi keuangan menjadi agenda strategis pemerintah melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan sejak 2016. Menurut Sarma (2012), inklusi keuangan dapat diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Aksesibilitas – ketersediaan lembaga keuangan dan produk yang dapat dijangkau masyarakat.
2. Penggunaan – tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat.
3. Kualitas – sejauh mana produk keuangan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Menurut Ascarya (2019), lembaga keuangan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Produk utama lembaga keuangan syariah meliputi:

- Pembiayaan Murabahah: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
- Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.
- Musyarakah: kerja sama modal antara dua pihak atau lebih.

- Tabungan Wadiah: titipan dana yang dapat ditarik kapan saja tanpa imbal hasil.
- Deposito Mudharabah: simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil.

Selain bank syariah, terdapat juga BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), koperasi syariah, dan fintech syariah yang berperan dalam memperluas akses keuangan berbasis syariah.

3. Hubungan Lembaga Keuangan Syariah dengan Inklusi Keuangan

Menurut teori Financial Intermediation (Diamond, 1984), lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks syariah, intermediasi dilakukan dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Hal ini memungkinkan masyarakat yang enggan menggunakan sistem konvensional untuk tetap terhubung dengan layanan keuangan formal.

Penelitian oleh Beck et al. (2013) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan menyediakan produk yang sesuai dengan nilai agama, lembaga keuangan syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani.

4. Teori Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Lusardi & Mitchell

(2014), literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang bunga, inflasi, risiko, dan diversifikasi. Dalam konteks syariah, literasi keuangan juga mencakup pemahaman tentang akad-akad syariah, prinsip halal-haram, serta mekanisme bagi hasil.

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Survei OJK (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan nasional yang mencapai 65,43%.

5. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Menurut teori Institutional Economics (North, 1990), regulasi dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam membentuk perilaku lembaga keuangan dan masyarakat. Di Indonesia, OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang manajemen risiko bank syariah.

Kebijakan pemerintah melalui SNKI juga menekankan pentingnya keuangan syariah sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan menjadi faktor moderasi yang memengaruhi hubungan antara lembaga keuangan syariah dan inklusi keuangan.

6. Kerangka Teori Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori di atas, penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

- Lembaga Keuangan Syariah → menyediakan produk berbasis syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, wadiah, fintech syariah).
- Literasi Keuangan Syariah → memengaruhi pemahaman dan penggunaan produk syariah.
- Kebijakan Pemerintah dan OJK → memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui regulasi dan program inklusi.
- Inklusi Keuangan Syariah → hasil dari interaksi antara lembaga keuangan, literasi masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode mixed methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial-ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi inklusi keuangan syariah, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel tertentu seperti literasi keuangan syariah, akses produk syariah, dan kebijakan pemerintah terhadap tingkat inklusi keuangan. Data kuantitatif diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta laporan lembaga keuangan syariah, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi lapangan.

Populasi penelitian terdiri dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, koperasi syariah, dan fintech syariah, serta nasabah lembaga keuangan syariah khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan

rendah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, dengan kriteria lembaga keuangan syariah yang aktif beroperasi dan memiliki laporan keuangan tahunan, UMKM yang telah menggunakan produk pembiayaan syariah, serta masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah. Jumlah sampel kuantitatif ditetapkan sebanyak 30 lembaga keuangan syariah dan 200 responden nasabah UMKM, sedangkan sampel kualitatif berupa 10 informan kunci dari regulator, akademisi, dan praktisi keuangan syariah.

Data penelitian diperoleh melalui data sekunder berupa statistik OJK dan Bank Indonesia, laporan tahunan bank syariah, BPRS, dan koperasi syariah, serta publikasi akademik terkait keuangan syariah. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Kuesioner disebarikan kepada nasabah UMKM untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah, akses produk, dan kepuasan terhadap layanan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh perspektif mengenai kebijakan, tantangan, dan peluang pengembangan keuangan syariah. Observasi lapangan dilakukan di beberapa daerah dengan tingkat penetrasi keuangan syariah yang berbeda.

Sebagai penguat analisis, penelitian ini juga menggunakan data inklusi keuangan nasional dan syariah. Berdasarkan survei OJK (2024), indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi keuangan nasional sebesar 75,02%. Namun, literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah masih rendah yaitu 12,88%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara inklusi keuangan nasional dan syariah.

Tabel 1. Data Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (OJK, 2024)

Indikator	Nasional (%)	Syariah (%)
Literasi Keuangan	65,43	39,11
Inklusi Keuangan	75,02	12,88

Tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan nasional sudah cukup tinggi, inklusi keuangan syariah masih jauh tertinggal. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan inklusi syariah, sekaligus menggali strategi yang dapat memperluas akses keuangan syariah.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu peran lembaga keuangan syariah (produk, layanan, jaringan, digitalisasi), variabel dependen yaitu tingkat inklusi keuangan (akses, penggunaan, kualitas layanan), serta variabel moderasi yaitu kebijakan pemerintah dan OJK (regulasi, literasi, dukungan infrastruktur). Instrumen penelitian meliputi kuesioner tertutup dengan skala Likert (1–5), panduan wawancara, serta checklist observasi. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan tingkat akses keuangan syariah, regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan kebijakan sebagai variabel moderasi, serta uji hipotesis (t-test dan F-test) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel. Analisis kualitatif dilakukan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan observasi, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, dan observasi.

Untuk memastikan validitas, instrumen penelitian diuji melalui expert judgment dari akademisi dan praktisi keuangan syariah. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimum 0,7 sebagai indikator konsistensi. Penelitian dilakukan di Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat selama enam bulan (Januari–Juni 2026). Etika penelitian dijaga dengan kerahasiaan data responden, persetujuan informan sebelum wawancara, serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survei OJK tahun 2024, indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi keuangan nasional sebesar 75,02%. Namun, literasi keuangan syariah hanya sebesar 39,11% dan inklusi keuangan syariah masih rendah yaitu 12,88%. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara inklusi keuangan nasional dan syariah. Meskipun masyarakat Indonesia secara umum sudah cukup terhubung dengan layanan keuangan formal, pemanfaatan layanan berbasis syariah masih sangat terbatas. Hal ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi pengembangan keuangan syariah.

Hasil kuesioner terhadap 200 responden UMKM menunjukkan bahwa 68% responden lebih memilih pembiayaan syariah karena bebas bunga dan sesuai prinsip agama. Produk yang paling banyak digunakan adalah murabahah (jual beli dengan margin) sebesar 45%, diikuti oleh mudharabah (bagi hasil) sebesar 30%, dan musyarakah (kerja sama modal) sebesar 15%. Sisanya menggunakan tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BPRS terbukti menjadi aktor utama dalam mendukung UMKM, sementara koperasi syariah lebih

banyak berperan di pedesaan. Fintech syariah mulai menunjukkan peran signifikan, terutama dalam pembiayaan mikro berbasis digital.

Wawancara dengan informan kunci dari OJK, BI, akademisi, dan praktisi menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat belum memahami akad-akad syariah secara mendalam. Kedua, jaringan lembaga keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah rural, sehingga akses masyarakat terhadap layanan syariah belum merata. Ketiga, regulasi fintech syariah masih perlu diperkuat untuk melindungi konsumen dari risiko penipuan dan penyalahgunaan data. Keempat, skala usaha sebagian lembaga syariah masih kecil sehingga sulit bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas.

Analisis data menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah mengalami peningkatan omzet rata-rata 20% dalam satu tahun. Selain itu, 72% responden menyatakan bahwa pembiayaan syariah membantu mereka keluar dari jerat pinjaman informal berbunga tinggi. Dampak sosial-ekonomi yang teridentifikasi meliputi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, pemberdayaan UMKM yang memperkuat daya saing usaha kecil, serta penguatan stabilitas sosial karena sistem bagi hasil menciptakan rasa keadilan dan mengurangi kesenjangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya literasi dan

keterbatasan jaringan menjadi faktor penghambat utama. Kebijakan pemerintah dan OJK terbukti berpengaruh positif, tetapi perlu diperkuat terutama dalam hal regulasi fintech syariah dan perluasan akses di daerah rural. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Jika literasi ditingkatkan, jaringan diperluas, dan regulasi diperkuat, maka inklusi keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Pengaruh Lembaga Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam memperluas akses keuangan di Indonesia. Dengan prinsip bebas riba, berbasis bagi hasil, dan keadilan, lembaga ini mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan konvensional. Beberapa pengaruh utamanya adalah:

1. Meningkatkan akses keuangan masyarakat Muslim – Produk syariah yang sesuai dengan nilai agama membuat masyarakat lebih percaya dan mau menggunakan layanan keuangan formal.
2. Pemberdayaan UMKM – Pembiayaan berbasis murabahah, mudharabah, dan musyarakah membantu UMKM memperoleh modal usaha dengan skema yang lebih adil.
3. Pengentasan kemiskinan – Layanan mikro syariah dan koperasi syariah memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan.
4. Mendorong literasi keuangan syariah – Edukasi tentang akad syariah meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap produk keuangan halal.

5. Stabilitas sosial-ekonomi – Sistem bagi hasil menciptakan rasa keadilan dan mengurangi ketimpangan, sehingga memperkuat stabilitas sosial.

Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga menghadapi berbagai risiko. OJK melalui POJK No. 18/POJK.03/2016 menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko bagi bank syariah. Risiko utama dan strategi pengelolaannya antara lain:

1. Risiko Kredit (Pembiayaan)
 - Terjadi ketika nasabah gagal membayar kewajiban.
 - Mitigasi: analisis kelayakan usaha, penerapan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), serta penggunaan akad berbasis bagi hasil untuk menekan risiko gagal bayar.
2. Risiko Likuiditas
 - Ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - Mitigasi: diversifikasi sumber dana, pengelolaan kas yang hati-hati, serta penggunaan instrumen pasar uang syariah.
3. Risiko Operasional
 - Timbul akibat kesalahan sistem, prosedur, atau SDM.
 - Mitigasi: penerapan SOP yang ketat, pelatihan SDM, serta digitalisasi layanan untuk mengurangi human error.

4. Risiko Reputasi

- Terjadi jika lembaga gagal menjaga kepercayaan masyarakat.
- Mitigasi: transparansi akad, edukasi nasabah, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

5. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

- Timbul akibat perubahan kebijakan atau pelanggaran aturan.
- Mitigasi: kepatuhan terhadap regulasi OJK dan DSN-MUI, serta audit syariah berkala.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap perluasan akses keuangan, terutama bagi masyarakat Muslim dan pelaku UMKM. Produk berbasis syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah terbukti mampu memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan stabilitas sosial-ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan besar yang harus diatasi. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jaringan lembaga keuangan di daerah rural, serta regulasi fintech syariah yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, baik dari sisi lembaga

keuangan syariah itu sendiri maupun dari kebijakan pemerintah dan OJK.

Manajemen risiko menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Lembaga keuangan syariah harus mampu mengelola risiko kredit, likuiditas, operasional, reputasi, serta kepatuhan terhadap regulasi agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, lembaga keuangan syariah tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, OJK, serta masyarakat dalam memperkuat literasi, memperluas jaringan, dan memperbaiki regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2019). *Financial Architecture for Inclusive Growth: Islamic Finance Perspective*. Bank Indonesia Institute.
- Aryanindita, R., Satrio, B., & Nasution, A. (2024). *Peran Bank Syariah dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(2), 45–60.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability*. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433–447.
- Bimasakti, R., & Warastuti, Y. (2024). *Pembiayaan Syariah dan Daya Saing UMKM di Indonesia*. Jurnal Keuangan Syariah, 10(1), 77–92.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dasuki, A. (2021). *Literasi Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(3), 112–125.
- Diamond, D. W. (1984). *Financial Intermediation and Delegated Monitoring*. Review of Economic Studies, 51(3), 393–414.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: BI.
- World Bank. (2021). *Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development.
- Satrio, B., & Nasution, A. (2024). *Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rumah Tangga*. Jurnal Ekonomi

- Islam, 8(2), 134–150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). (2016). *Dokumen Kebijakan*. Jakarta: Sekretariat SNKI.
- Ascarya, R., & Yumanita, D. (2020). *Islamic Finance for Inclusive Growth in Indonesia*. Bank Indonesia Working Paper.
- Beck, T., & Brown, M. (2011). *Which Households Use Banks? Evidence from the Transition Economies*. *World Development*, 39(4), 655–666.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, Z. (2011). *Financial Inclusion and Islamic Finance: A Policy Perspective*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 28(2), 15–30.
- Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic Banking?*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute.

DETERMINAN INDIKASI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING: PERAN AUDIT TENURE, AUDITOR SWITCHING SUKARELA, DAN AUDIT DELAY

Herman Wijaya¹

unsera.herman@gmail.com

Wiwin Arifin²

wwarifin@yahoo.com

Universitas Serang Raya¹⁻²

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of audit tenure, voluntary auditor switching, and audit delay on indications of fraudulent financial reporting among property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2023–2025 period. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the companies' annual financial reports. The sample consists of 45 companies selected using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the aid of SPSS software (version 25). The results indicate that audit tenure has a positive and significant effect on indications of fraudulent financial reporting. Furthermore, voluntary auditor switching and audit delay were also found to have a positive and significant effect on indications of fraudulent financial reporting. Collectively, these three variables significantly influence indications of fraudulent financial reporting. These findings demonstrate that factors related to the audit process play a crucial role in identifying the potential for financial reporting fraud within property and real estate companies.

Keywords: *Audit Tenure, Voluntary Auditor Switching, Audit Delay, Fraudulent Financial Reporting*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit tenure, voluntary auditor switching, dan audit delay terhadap indikasi fraudulent financial reporting pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 45 perusahaan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi fraudulent financial reporting. Selain itu, voluntary auditor switching dan audit delay juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi fraudulent financial reporting. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap indikasi fraudulent financial reporting. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan proses audit memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan pada perusahaan properti dan real estat.

Kata Kunci: *Audit Tenure, Voluntary Auditor Switching, Audit Delay, Fraudulent Financial Reporting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas kepada investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga laporan keuangan harus disajikan secara andal, relevan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) untuk memperoleh keuntungan tertentu atau mempertahankan citra perusahaan. Tindakan tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disajikan (*Association of Certified Fraud Examiners [ACFE]*, 2022).

Berdasarkan Report to the Nations yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan laporan keuangan memang memiliki jumlah kasus yang lebih sedikit dibandingkan penyalahgunaan aset dan korupsi, namun menimbulkan kerugian finansial yang paling besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa *fraudulent financial reporting* merupakan salah satu bentuk fraud yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan maupun kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui audit eksternal yang berkualitas (ACFE, 2022).

Peran auditor independen menjadi sangat penting dalam memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah

disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akan tetapi, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya audit tenure, voluntary auditor switching, dan audit delay. Audit tenure merupakan lamanya hubungan kerja sama antara auditor dengan klien. Hubungan audit yang terlalu lama dikhawatirkan dapat mengurangi independensi auditor sehingga memengaruhi objektivitas dalam mendeteksi indikasi kecurangan laporan keuangan (Astrini & Muid, 2013).

Selain audit tenure, voluntary auditor switching juga menjadi salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan kualitas audit. Pergantian auditor yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap auditor sebelumnya, perubahan manajemen, maupun strategi perusahaan. Pergantian auditor yang terlalu sering dapat menimbulkan persepsi negatif dari investor karena dianggap berkaitan dengan upaya manajemen untuk memperoleh auditor yang lebih mudah menerima kebijakan akuntansi perusahaan (Dewi, Febriyanti, & Rustiarini, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit tenure, voluntary auditor switching, dan audit delay terhadap indikasi *fraudulent financial reporting* pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu auditing, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi indikasi kecurangan pelaporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi auditor, perusahaan, investor, dan regulator dalam

meningkatkan kualitas audit serta meminimalkan risiko terjadinya fraudulent financial reporting.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendasari hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Masalah keagenan timbul akibat pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Manajer bertanggung jawab memaksimalkan keuntungan pemilik, namun sering memiliki kepentingan pribadi untuk meningkatkan fasilitas dan kekayaan mandiri. Konflik kepentingan ini memicu asimetri informasi, di mana manajer memiliki informasi operasional yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham. Dalam kondisi asimetri informasi, manajemen terdorong melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kinerja riil demi mempertahankan reputasi dan insentif.

Teori Fraud

Berdasarkan Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99, fraud mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan kesengajaan yang menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga cabang utama (Fraud Tree): penyalahgunaan aset (asset misappropriation), kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial statements), dan korupsi (corruption). Kecurangan pelaporan keuangan melibatkan rekayasa angka atau pengungkapan akun untuk mengelabui pengguna laporan keuangan, baik dengan menyajikan pendapatan/aset terlalu tinggi (overstatement) maupun terlalu rendah (understatement).

Fraudulent Financial Reporting

Penyajian laporan keuangan yang secara sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan investor dan kreditur. Dalam penelitian ini, kecurangan diukur menggunakan model F-Score (Dechow et al., 2011) yang mengintegrasikan kualitas akrual (RSST Accrual) dan kinerja keuangan (change in receivable, inventories, sales, dan earnings). Nilai *F-Score* > 1 mengindikasikan adanya kecurangan.

Audit Tenure

Lamanya masa perikatan audit secara berturut-turut antara Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor dengan perusahaan klien. Penugasan yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan ikatan emosional, sehingga mengikis independensi dan objektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor Switching Secara Sukarela: Pergantian auditor/KAP yang dilakukan atas kehendak manajemen perusahaan, bukan karena batas regulasi wajib OJK (POJK No. 13/POJK.03/2017). Tingginya pergantian sukarela merupakan sinyal manajemen mencoba menyembunyikan rekayasa keuangan dari auditor lama, memanfaatkan keterbatasan pemahaman auditor baru terhadap bisnis auditee.

Audit Delay

Audit delay adalah Rentang waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga penandatanganan laporan audit independen. Keterlambatan melebihi batas OJK (POJK No. 29/POJK.04/2016; akhir bulan keempat) sering terjadi akibat hambatan bukti audit atau proses koreksi atas manipulasi laporan keuangan.

H1: Audit Tenure berpengaruh positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Masa perikatan audit yang

terlalu lama menurunkan independensi auditor akibat timbulnya kedekatan emosional dengan klien, sehingga potensi manipulasi laporan keuangan semakin tinggi.

H2: Auditor Switching secara Sukarela berpengaruh positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Pergantian auditor secara sukarela dimanfaatkan manajemen untuk menyembunyikan rekayasa keuangan dari auditor lama, mengingat auditor baru memerlukan waktu adaptasi untuk memahami risiko kecurangan perusahaan.

H3: Audit Delay berpengaruh positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Semakin lama penundaan penerbitan laporan audit, semakin besar kecenderungan adanya penyembunyian bukti transaksi atau pengkoreksian atas manipulasi laporan keuangan.

H4: Audit Tenure, Auditor Switching secara Sukarela, dan Audit Delay secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (quantitative research). Dalam penelitian yang digunakan adalah desain penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI Pada Tahun 2023-2025 Data yang digunakan adalah data laporan tahunan dan laporan keuangan yang diunduh dari situs resmi BEI yaitu

www.idx.co.id.

Populasi:

Seluruh perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2023–2025 (sebanyak 61 perusahaan).

Teknik Pengambilan Sampel:

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sampel representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2023-2025
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan berturut turut selama periode penelitian
3. Memiliki variabel penelitian yang di teliti.

Setelah dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan kriteria didapatkan jumlah perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian adalah 48 dengan jumlah data penelitian adalah sebanyak 144.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen

Dalam penelitian ini yaitu Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Pada variabel ini dihitung dengan menggunakan f-score dengan ketentuan jika nilai f – score perusahaan lebih dari 1 (satu) maka terindikasi melakukan Fraudulent Financial Reporting sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terindikasi melakukan kecurangan (nonfraud) nilai fcsore nya kurang dari 1, dikembangkan oleh Dechow, Larson, and Sloan (2011) Dalam (Ratmono et al., 2020).

$$F\text{-Score} = \text{Accrual Quality} + \text{Financial Performance}$$

Kualitas akrual (Accrual Quality) diproksikan dengan RSST Accrual, yang dihitung dengan perubahan aktiva lancar dikurangi dengan perubahan kewajiban lancar, dan penyusutan serta perubahan long-term operating asset dan long-term operating liabilities (rini 2012), dihitung dengan rumus

$$RSST \text{ Accrual} = (\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN) / \text{Average Total Asset}$$

1. WC (Working Capital)

WC = Current Assets – Current Liability
NCO (Non Current Operating Accrual) NCO = Total Assets – Current Assets – Total Investment) – (Total Liabilities – Current Liabilities – liabilitas jangka panjang)

2. FIN (Financial Accrual)

FIN = Total Investment – Total Liabilities

3. ATS (Average Total Assets)

ATS = (Beginning Total Asset + End Total Assets) : 2

Kinerja keuangan (Financial Performance) diproksikan dengan perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan penjualan tunai, dan perubahan pada earning before interest and tax (EBIT). Rumus perhitungan Financial Performance adalah sebagai berikut :

$$\text{Financial Performance} = \text{change in receivable} + \text{change in inventories} + \text{change in cash sales} + \text{change in earnings}$$

Change in receivable = Delta Piutang / Rata-rata total aset

Change in inventories = Delta Persediaan / Rata-rata total aset

Change in sales = (Delta Pendapatan / Pendapatan (t)) – (Delta Piutang / Piutang

(t))

Change in earnings = [Ekuitas (t) / Rata-rata total aset (t)] – [Ekuitas (t-1) / Rata-rata total aset (t-1)]

Variabel Independen

1. Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Variabel Audit Tenure, dihitung dengan menjumlah total panjang masa perikatan audit sebelum auditor berpindah. Cara pengukuran audit tenure dalam penelitian ini menggunakan Tahun pertama Perikatan Auditor dimulai dengan angka 1 satu) dan ditambah dengan 1 (satu) untuk tahun-tahun berikutnya

2. Auditor Switching Secara Sukarela

Indikator pengukuran untuk auditor switching pada penelitian ini menggunakan variabel dummy Nilai 1 disini menunjukkan adanya pergantian Auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien dan nilai 0 bila tidak ada pergantian Auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien.

3. Audit Delay

Audit Delay diukur dengan menghitung selisih antara penutupan tahun buku sampai dengan ditandatanganinya laporan keuangan audit, yang dapat dirumuskan: Audit Delay = Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan.

Jenis dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperlukan diperoleh dengan metode dokumentasi, yaitu data-data yang terdapat pada dokumen-dokumen yang sudah ada. Data sekunder yang dimaksudkan adalah laporan keuangan dan annual report perusahaan yang didapat dari website resmi Bursa Efek Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Audit Tenure	130	1,00	3,00	1,5769	0,66897
Auditor Switching secara sukarela	130	0,00	1,00	0,4538	0,49979
Audit Delay	130	58,00	183,00	103,0154	21,63760
Indikasi Fraudulent Financial Reporting	130	-9,51	3,80	-0,3976	1,57978
Valid N (listwise)	130				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Indikasi Fraudulent Financial Reporting memiliki nilai rata-rata sebesar -0,3976 dan standar deviasi sebesar 1,5798. Mengacu pada penelitian Skousen dan Twedt (2009), nilai rata-rata yang rendah dan standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa probabilitas terjadinya fraud pada perusahaan sektor Property dan Real Estate tergolong tinggi.

Variabel Audit Tenure (X1) memiliki nilai minimum 1, maksimum 3, rata-rata 1,5769, dan standar deviasi 0,6690. Karena nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, dapat disimpulkan bahwa data Audit Tenure memiliki persebaran yang baik.

Variabel Auditor Switching (X2) memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1, yang menunjukkan bahwa nilai 0 berarti perusahaan tidak melakukan auditor switching, sedangkan nilai 1 berarti perusahaan melakukan auditor switching. Variabel ini memiliki rata-rata 0,4538 dan standar deviasi 0,4998. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa data Auditor Switching

memiliki variasi yang cukup tinggi.

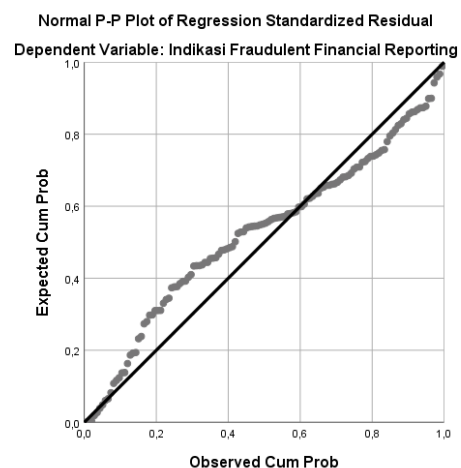
Variabel Audit Delay (X3) memiliki nilai minimum 58 hari dan maksimum 183 hari, dengan rata-rata 103,0154 hari dan standar deviasi 21,6376. Nilai rata-rata yang lebih besar daripada standar deviasi menunjukkan bahwa data Audit Delay memiliki persebaran yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Agar model regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik yang sesuai dengan asumsi regresi, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

Uji Normalitas

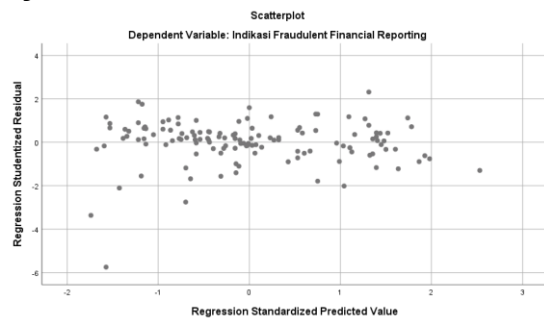
Berdasarkan uji grafik distribusi (Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual),



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji grafik distribusi (Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual), grafik menunjukkan data tersebar mendekati dan mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal

Uji multikolinearitas



Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai tolerance dan variace inflation factor (VIF), apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi multikolonieritas. Adapun hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Uji multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Audit Tenure	0,904	1,107
	Auditor Switching secara sukarela	0,897	1,115
S	Audit Delay	0,943	1,061

a. Dependent Variable: Indikasi Fraudulent Financial Reporting

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing - masing variabel penelitian memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10. Selain itu, hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa masing – masing variabel penelitian memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji Heteroskedastisitas menggunakan

scatterplots. Menurut Imam Ghozali (2011:139) Heteroskedastisitas tidak terjadi jika tidak ada pola yang jelas seperti (bergelombang, melebar kemudia menyempit atau mengumpul di satu titik) pada gambar scatterplots , serta titik- titik berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas scatterplots

pada gambar dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas seperti (bergelombang, melebar kemudia menyempit atau mengumpul di satu titik) pada gambar scatterplots , serta titik- titik berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pada penelitian ini uji autokorelasi diuji dengan menggunakan uji Durbin Watson, menurut imam Ghozali (2011:111) tidak ada gejala autokorelasi, jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du). Adapun hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,951

a. Predictors: (Constant), Audit Delay, Audit Tenure, Auditor Switching secara sukarela

b. Dependent Variable: Indikasi Fraudulent Financial Reporting

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Durbin Watson adalah 1,951. Sedangkan nilai du berdasarkan pada distribusi nilai tabel Durbin Watson adalah $k(3)$ dan $N(130)$ dengan signifikansi 5%

adalah du (1,7610). Jadi nilai du (1,7610) < Durbin Watson (1,951) < 4-du (2,239) Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi pada data penelitian.

Analisis Regresi linier berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	3,799	0,640	-5,938	0,000
	Audit Tenure	0,933	0,193	4,833	0,000
	Auditor Switching secara sukarela	0,603	0,259	2,326	0,022
	Audit Delay	0,016	0,006	2,750	0,007
a. Dependent Variable: Indikasi Fraudulent Financial Reporting					

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = -3,799 + 0,933 X_1 + 0,603 X_2 + 0,016 X_3$$

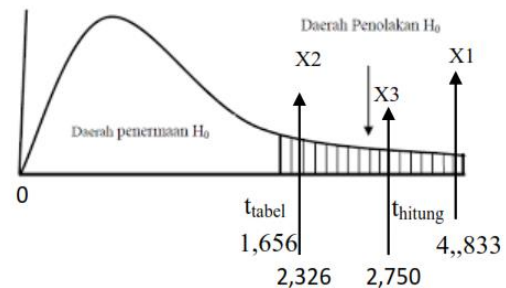
Uji Hipotesis

Uji t parsial

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	5,938	0,000
	Audit Tenure	4,833	0,000
	Auditor Switching secara sukarela	2,326	0,022
	Audit Delay	2,750	0,007
	a. Dependent Variable: Indikasi Fraudulent Financial Reporting		

Menurut Iman Ghozali (2011:101) jika nilai sig < 0,05 maka artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel

Dependent. Menurut V.Wiratna sujarweni (2014;155) jika nilai thitung > ttabel maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).



Gambar 4 Kurva daerah Keputusan Uji T

Pengaruh Audit Tenure, terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai hitung one tailed Audit Tenure adalah 4,833 dengan Degree of Freedom (df) = n-3 = 130-3 = 127 dan nilai signifikasi satu arah 0,05. Sehingga di dapat nilai ttabel sebesar 1,656. Berdasarkan gambar hasil uji satu arah menunjukkan nilai thitung > ttabel dengan nilai (4,833 > 1,656) dengan nilai signifikan Audit Tenure, 0,00 yang berarti nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima, yang artinya Audit Tenure berpengaruh Positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting.

Berdasarkan penelitian sebelumnya enurut (Angela et al., 2019) dan (Nasir et al., 2021) hubungan antara klien dan auditor ampu mengurangi Independensi dari auditor sehingga kemungkinan adanya auditor dapat terpengaruh dan terlalu terikat dengan klien sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga kecurangan laporan keuangan pun dapat terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Martha et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa Audit Tenure,

berpengaruh terhadap Kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Auditor Switching terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting

Berdasarkan gambar hasil uji t satu arah diatas, menunjukkan nilai thitung > ttabel dengan nilai ($2,326 > 1,656$) dan nilai signifikan Auditor Switching 0,02 yang berarti nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H2) diterima, yang artinya Auditor Switching Secara Sukarela berpengaruh positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Perusahaan yang dengan sengaja sering melakukan Auditor Switching yang inggi di indikasikan sebagai suatu bentuk menghilangkan atau menghapus jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya (Bawekes et al., 2018).

Kecenderungan ini mendorong perusahaan untuk melakukan Auditor Switching Secara Sukarela untuk menutupi kecurangan pelaporan keuangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya (Septriani, 2018). Perusahaan yang melakukan kecurangan mempunyai frekuensi Auditor Switching lebih sering dikarenakan untuk mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pelaporan keuangan pihak manajemen perusahaan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kejadian kegagalan audit setelah adanya auditor switching. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Achmad, 2018) yang menunjukkan bahwa Auditor Switching berkorelasi positif dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Auditor Switching secara sukarela, indikasi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan semakin tinggi.

Pengaruh Audit Delay terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting Berdasarkan gambar hasil uji t satu arah diatas, menunjukkan nilai thitung > ttabel dengan nilai ($2,750 > 1,656$) dan nilai signifikan Audit Delay 0,007 yang berarti nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan hipotesis (H3) diterima, yang artinya Audit Delay berpengaruh positif terhadap Indikasi Fraudulent Financial Reporting. Semakin lama penundaan penyampaian Laporan keuangan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan akan semakin tinggi. Karena Perusahaan yang mendapatkan laba yang besar tidak ada alasan untuk menunda penerbitan laporan keuangan audit bahkan cenderung akan mempercepat penerbitan laporan keuangan auditor karena perusahaan yang mengalami laba untuk membeli saham sehingga akan menyebabkan kenaikan harga saham.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Maulana (2017) yang menyatakan bahwa Audit Delay berpengaruh positif terhadap adanya Indikasi Fraudulent Financial Reporting.

PENUTUP

kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Audit Tenure, Auditor Switching secara sukarela, dan Audit Delay masing-masing berpengaruh positif terhadap indikasi Fraudulent Financial Reporting pada perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023–2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa perikatan auditor, semakin sering perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela, serta semakin tinggi audit delay, maka semakin besar pula indikasi terjadinya kecurangan dalam pelaporan

keuangan.

Selain itu, Audit Tenure, Auditor Switching secara sukarela, dan Audit Delay secara simultan juga berpengaruh terhadap indikasi Fraudulent Financial Reporting. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan potensi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga perlu menjadi perhatian bagi perusahaan, auditor, dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas audit serta meminimalkan risiko fraud..

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE 2019. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. Auditor Essentials, 1–60. Achmad, T. (2018). Pengaruh Kualitas Audit Dan Auditor Switching Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 18(2), 110–125.
- Akuntansi, J. I., & P-issn, F. I. (2023). Pengaruh Kualitas Audit, Audit Tenure, dan Nature of Industry terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021 Volume 6, No. 2, April 2023. 6(2), 83–98.
- Arifin, J. (2020). Fraud, Mendeteksi Dan Mengatasinya (Pendekatan Akuntansi Forensik & Audit Investigatif) (Vol. 1, pp. 1–108).
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018). Report To the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- indonesia/
- Elevendra, D., & Yunita, N. H. (2021). Pengaruh Audit Tenure dan Auditor Switching terhadap Kualitas Audit dengan Financial Distress sebagai Pemoderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(1), 82–97. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea>
- Fajri, N. A. M., Febrianti, B. gita, & Rahmayani, S. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Properti dan Real estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(2), 767–780.
- Hendrawaty, E. (2017). Perspektif Excess Cash Dalam Teori Keagenan. Kembali, P., Keuangan, L., Akuntansi, M. J., Ekonomi, F., Riau, U., Akuntansi, D. J., Ekonomi, F., & Riau, U. (2021). 1) , 2) , 2) 1). 8, 1–15.
- Martha, R., Wenny, C. D., Akuntansi, J., Multi, U., & Palembang, D. (2021). audit tenure, audit switching,. 4(1), 110–117.
- Nur apandi, R. N. (2013). Pengaruh Audit Tenure Terhadap Fraudulent Financial Reporting Dengan Pendekatan Akruak Diskresioner. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 8. <https://doi.org/10.17509/jrak.v1i1.6569>
- Prof. H. Imam Ghazali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis

- Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Effendi,erfan. 2021. Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit. Indramayu: Penerbit Adab
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Rachmania, A. (2018). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 1–19.
- Rachmawati, D., & Br.Pinem, D. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Equity, 18(1), 1–18.
- Rachmawati, & Marsono. (2014). Perspektif Fraud Triangle terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Kasus pada Perusahaan Berdasarkan Sanksi dari Bapepam Periode 2008-2012) | Rachmawati | Diponegoro Journal of Accounting. Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Terhadap Fraudulent Financial Reporting, 3, 1–14.
- Ratmono, D., Darsono, D., & Cahyonowati, N. (2020). Financial Statement Fraud Detection With Beneish M-Score and Dechow F-Score Model: An Empirical Analysis of Fraud Pentagon Theory in Indonesia. International Journal of Financial Research, 11(6), 154. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p154>

PERAN INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: PENDEKATAN EKONOMI PUBLIK

Setiawandi Hakim

setiawandihakim@yahoo.ci.id

Universitas Serang Raya

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of integrity in increasing Locally-Generated Revenue (Pendapatan Asli Daerah) through a public economics approach. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Secondary data were utilized, sourced from laws and regulations, financial and performance reports of the Banten Provincial Government, official government documents, and relevant scholarly literature. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research findings indicate that the integrity of government officials plays a strategic role in enhancing the effectiveness of local tax administration by applying principles of transparency, accountability, professionalism, and compliance with regulations. Integrity serves to prevent practices such as bribery, illicit gratuities, and the abuse of authority, which could otherwise lead to leakages in local revenue. Officials with integrity also strengthen local tax law enforcement, thereby encouraging taxpayers to comply with their tax obligations. These conditions lead to the optimization of local tax revenue—a primary component of Locally-Generated Revenue—and bolster the local government's fiscal capacity to fund development and public services. The study concludes that strengthening official integrity—supported by effective oversight systems, the digitalization of tax services, and the application of good governance principles—is a crucial factor in sustaining the growth of Locally-Generated Revenue.

Keywords: integrity, Locally-Generated Revenue, local tax, public economics, governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendekatan ekonomi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Integritas mampu mencegah praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah. Aparatur yang berintegritas juga memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan daerah sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas aparatur, didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta penerapan prinsip *good governance*, merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *integritas, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, ekonomi publik, tata kelola pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian dari implementasi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah memerlukan kapasitas fiskal yang memadai agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang tercermin dari kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya (Halim, 2019).

Salah satu sumber utama kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Alfatarisya, A. 2022). Di antara komponen tersebut, pajak daerah merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan PAD di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, sehingga

optimalisasi penerimaan pajak menjadi strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan pembangunan dan kualitas pelayanan publik sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara lebih efektif (Mardiasmo, 2021).

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat tentu harus dilaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Sedangkan pembangunan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna kalau tidak memiliki pembiayaan yang maksimal (Hardiana, D. R. 2022). Pembiayaan yang dapat mencukupi pembangunan tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah Pendapatan Asli Daerah disamping sumber sumber pendapaatan daerah yang lainnya seperti bantuan Pemerintah atau pinjaman daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang termasuk di dalamnya terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama biaya pembangunan di Provinsi Banten (Yuliana, 2019)

Pemerintah Provinsi Banten memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui APBD Award 2024 dengan meraih dua kategori penghargaan, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi dan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kapasitas fiskal

daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan berbasis teknologi informasi. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah, telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. (birokesra, 2024) Penghargaan tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, prestasi yang diraih Provinsi Banten menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Kamase et al, 2024)

Meskipun Pemerintah Provinsi Banten telah menunjukkan capaian yang baik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan daerah masih terus dihadapi. Optimalisasi PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Praktik pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sepenuhnya transparan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan, serta lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas pemungutan PAD. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya integritas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. (Achmadini, 2023)

Dalam perspektif ekonomi publik, integritas merupakan modal institusional yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur yang berintegritas akan melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah secara jujur, transparan, akuntabel, dan profesional sehingga mampu meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Di sisi lain, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan dan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga oleh kualitas integritas aparatur pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui perspektif ekonomi publik, sehingga dapat memberikan pemahaman

mengenai hubungan antara nilai-nilai integritas, efektivitas pengelolaan penerimaan daerah, dan upaya mewujudkan kemandirian fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Diantara pajak daerah dan redistribusi daerah, pajak daerah memiliki potensi paling tinggi dalam penerimaan pendapatan daerah. Sehingga pemerintah daerah memfokuskan penerimaan pendapatan asli daerah kepada pajak daerah baik dalam menggali potensi wajib pajak baru maupun dalam mengefektifkan wajib pajak yang sudah membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pajak yang dipungut oleh

pemerintah provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Rokok; dan
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batubara (MBLB).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran integritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perspektif ekonomi publik. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dokumen resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara integritas, tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan membayar pajak.

Orang atau badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan wajib pajak, maka harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, telah memiliki kejelasan mengenai siapa saja yang menjadi subjek

pajak atau wajib pajak, bagaimana cara melaporkannya, cara membayar pajaknya dan kapan harus membayar pajak.

Pemerintah juga telah mengatur jenis jenis pajaknya baik untuk pajak pusat, pajak provinsi maupun pajak untuk kabupaten kota. Semua sudah diatur dengan jelas dan terinci. Misalkan untuk pajak provinsi diantaranya pajak air permukaan dan pajak alat berat. Untuk pajak air permukaan Subyek Pajaknya adalah Orang atau badan hukum yang mengambil dan atau memanfaatkan air permukaan, dilaporkan tiap bulan oleh wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah. Masa pajaknya satu bulan sehingga dibayarnya tiap bulan setelah mendapatkan penetapan pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan”.

Kemudian untuk wajib pajak alat berat, sangat jelas juga bahwa orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai alat berat merupakan subyek pajak atau wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan alat beratnya ke Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten atas laporan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat oleh subjek pajak melakukan penetapan pajak dengan media Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk masa pajak satu tahun, sehingga pajak alat berat dibayar setiap satu tahun sekali oleh subjek pajak.

Baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Banten yang mengatur pajak memiliki sifat yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu memiliki sifat memaksa, berlaku

bagi setiap orang yang menjadi subjek dari peraturan tersebut. Sifat memaksa tersebut tercermin dalam ketentuan pada pasal-pasal terakhir yang umumnya memuat sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten yang mengatur mengenai pajak daerah, yang juga memuat ketentuan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan daerah.

Dengan dituangkannya penormaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah tersebut termasuk dalam Perda Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur Banten, memiliki makna bahwa setiap wajib pajak wajib melakukan kewajibannya membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Penyuapan dan Gratifikasi

Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Banten maupun Peraturan Gubernur Banten telah mengatur sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dalam implementasinya masih terdapat banyak wajib pajak atau perusahaan yang berupaya menghindari kewajiban tersebut. Bentuk penghindaran yang dilakukan beragam, mulai dari tidak membayar pajak sama sekali hingga membayar pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai cara dilakukan, seperti memanipulasi data, menyembunyikan informasi, atau tidak melaporkan objek pajak yang sebenarnya.

Namun, salah satu praktik yang paling sering dilakukan dalam upaya menghindari

kewajiban perpajakan adalah melalui pemberian suap dan atau gratifikasi kepada oknum petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan penerimaan daerah, tetapi juga mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perpajakan daerah. Praktek-praktek tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Integritas

Untuk melawan perbuatan perbuatan kotor yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut berupa pemberian suap dan gratifikasi kepada oknum petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan adalah dengan membentuk dan menciptakan integritas petugas-petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan tersebut.

Ketika integritas petugas-petugas yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, maupun penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan telah tercipta dan terbentuk maka petugas-petugas tersebut akan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dengan menjalankan seluruh ketentuan di bidang perpajakan daerah Provinsi Banten.

Dengan demikian wajib pajak yang sebelumnya memiliki keinginan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak daerah berhadapan dengan petugas yang berintegritas, maka peluang dan keinginan untuk menghindari kewajiban tersebut menjadi tidak ada. Petugas yang menjunjung tinggi integritas akan

melaksanakan tugasnya secara profesional, objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap wajib pajak akan diwajibkan memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten yang mengatur perpajakan.

Di sisi lain, petugas pemungut pajak maupun petugas yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah di bidang perpajakan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan menjunjung tinggi integritas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk suap dan gratifikasi, dengan demikian penegakan hukum di bidang perpajakan daerah dapat terlaksana secara efektif, adil, dan akuntabel, sehingga dapat terbentuk kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Dengan terbentuk kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah tersebut dan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dan berintegritas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah akan meningkat dan maksimal. Kondisi tersebut akan memperkuat keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada Sejalan dengan hal tersebut, terkait dengan integritas, Rose menekankan pada perlunya membangun nilai-nilai kejujuran dan integritas pada masyarakat termasuk anggota kelompok dalam organisasi.

If we want to really get at corruption, we need to build up values of honesty and integrity in society Honesty, prosocial preferences and a sense of right and wrong constitute a part of the human psyche , even though we can create societies where such traits are barely visible.

Jika kita ingin benar-benar dapat bebas dari korupsi, kita perlu membangun nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam masyarakat. Kejujuran, preferensi prososial dan rasa benar dan salah merupakan bagian dari jiwa manusia, meskipun kita dapat membuat masyarakat di mana sifat-sifat seperti itu nyaris tidak terlihat (Rose, 2016:233).

Kemudian terkait gratifikasi Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Provinsi Banten. Tujuan yang ditentukan dalam pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Provinsi Banten yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan larangan gratifikasi, menciptakan peyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Integritas dihasilkan dari dalam diri pegawai atas dasar kesadaran terpadu yang diperoleh dari penghayatan mendalam akan suatu proses yang pernah dialami melalui kreatifitas, nilai, intuisi, emosi dan daya analisis-rasional. Integritas bisa memunculkan gema, medan gaya-energi, kreatifitas dan kebanggaan. Integritas yang dimiliki oleh seseorang, kemudian akan ditularkan kepada orang lain dalam organisasi baik melalui hubungan individual, kelompok, dan keorganisasian.

PENUTUP

Kesimpulan

Integritas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor pajak daerah.

Meskipun regulasi mengenai perpajakan daerah telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan integritas aparatur yang bertugas dalam pengelolaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan faktor yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah serta mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dalam perspektif ekonomi publik, integritas merupakan modal institusional yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola perpajakan daerah. Aparatur yang berintegritas akan menjalankan tugas secara profesional, jujur, objektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mencegah praktik korupsi serta memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Kondisi tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, serta mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan budaya integritas, penerapan sistem pengendalian gratifikasi, peningkatan pengawasan internal, penegakan sanksi secara

konsisten, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral bagi aparatur pemerintah, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Pemerintah Provinsi Banten perlu terus memperkuat integritas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui internalisasi nilai-nilai etika, peningkatan kompetensi, penerapan sistem pengendalian gratifikasi, serta pengawasan internal yang efektif. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran integritas harus dilakukan secara konsisten agar tercipta kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penguatan integritas aparatur diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.

Untuk menjaga agar target PAD tetap tercapai bahkan meningkat dari tahun ke tahun, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data perpajakan, digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak, penguatan pengawasan terhadap objek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi objek dan subjek pajak baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga basis penerimaan daerah semakin luas dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengelolaan PAD yang berbasis teknologi informasi (e-government) secara terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi perpajakan. Pemanfaatan sistem digital tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik suap dan gratifikasi.

Di samping itu, sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, aparat penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta masyarakat perlu terus diperkuat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PAD. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi publik juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadini, A., & Yulina, B. (2023). Pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan. *Edunomika*, 8(1), 1–12.
- Alfatarisya, A. (2022). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tangerang*. Galang Tanjung, 26–59.

- Dilapanga, R., Puluhulawa, F. U., Kasim, N. M., Hukum, M., Universitas, P., Gorontalo, N., Daerah, O. P., & Intern, A. P. (2023). Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan *good governance* melalui asas akuntabilitas. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9, 16–24. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>
- Hardiana, D. R. (2022). Analisis implementasi desentralisasi fiskal (Kebijakan transfer dana ke daerah pada realisasi APBN 2021 pasca Coronavirus Disease-19). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 16–29.
- Halim, A. (2019). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *JISIPOL*, 4(2).
- Kamase, H. P., Pore, G., Abdullah, M. I., & Yamin, N. Y. (2024). The impact of corruption on local revenue in Indonesia's fiscal decentralization era. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 187–196. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1292>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muksin, A., Istriani, R., & Rismalasari, S. (2024). Penyelenggaraan urusan wajib daerah: Tinjauan konseptual dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 485–492.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Wulandari, Widiawati, H. S., & Sugeng. (2022). Pengaruh PBB, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk 2020–2022. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*, 617–625.
- Yuliana, H., & Yunani, A. (2019). Analisis penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 184–196.
- Sumber website:**

Provinsi Banten. (2024). *Provinsi Banten*
raih dua kategori APBD Award
2024 Kemendagri.
[https://birokesra.bantenprov.go.id](https://birokesra.bantenprov.go.id/berita/provinsi-banten-raih-dua-)
[/berita/provinsi-banten-raih-dua-](https://birokesra.bantenprov.go.id/berita/provinsi-banten-raih-dua-)

[kategori-apbd-award-2024-](#)
[kemendagri](#)

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BBPVP SERANG

Raga Aquino¹
ragasetya77@gmail.com
Iin Farlina²
Iinfarlina22@gmail.com
Urfanul Aulia³
urfanulaulia@gmail.com
Universitas Banten¹⁻³

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of transformational leadership and work discipline on employee performance. A quantitative research method was employed, utilizing questionnaires for data collection and the Slovin formula for sampling, resulting in a sample size of 62 employees.

Statistical analysis revealed that both transformational leadership and work discipline have a positive and significant influence on employee performance when analyzed individually (partially); furthermore, when analyzed collectively (simultaneously), they also exert a positive and significant influence on performance.

Keywords: *transformational leadership, work discipline, and employee performance.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*. Dengan sampel 62 pegawai.

Hasil dari analisis statistik tentang kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dari hasil uji secara parsial bahwa terdapat pengaruh yg positif dan signifikan antara kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, serta secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.

Kata kunci: kepemimpinan transformasional, disiplin kerja dan kinerja pegawai.

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Era digitalisasi saat ini memudahkan interaksi antara manusia dan manusia dalam melakukan aktivitasnya, kemajuan teknologi saat ini sangat membantu aktivitas dalam melakukan pekerjaan, bisnis dan lainnya. Terutama dibidang bisnis dan usaha digitalisasi saat ini jadi trend dalam meingkatkan kinerja perusahaan ataupun intansi pemerintah. Begitupun intansi pemerintah baik BUMN ataupun pemerintah pusat mapun daerah sudah beralhi ke era digitalisasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan kepemimpinan yang difokuskan pada menginspirasi serta memotivasi anggota tim agar mencapai potensi terbaik mereka serta menciptakan perubahan positif di dalam organisasi. Dalam gaya kepemimpinan ini, peran utama pemimpin adalah merancang visi yang kuat, memberikan inspirasi kepada karyawan, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam tim. Selain itu, pemimpin transformasional juga memiliki tanggung jawab penting dalam membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, mendengarkan serta memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional bertujuan untuk membentuk individu yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan organisasi. (Marlius et al, 2024)

Adapun variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah disiplin kerja, disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan dikerjakan oleh semua karyawan atau pegawai dalam ranga meningkatkan kinerja pegawai, dengan disiplin yang tinggi maka

hasil kinerja karyawan atau pegawai akan terasa signifikan dan berdampak pada kinerja perusahaan atau organisasi lainnya.

Selain itu kedisiplinan juga mempengaruhi kinerja karyawan dimana kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu.

Kedisiplinan harus ditegaskan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jika karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi dan disiplin terhadap peraturan yang ada maka kinerja dari karyawan juga akan semakin baik. (Kresna et al,2024).

Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat hasil kerja atau kemampuan pegawai dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang diberikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja juga bermakna sebagai ukuran suatu hasil kerja, oleh karena itu kinerja pegawai dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan pegawai dalam aktivitas bekerja. (Nahdiati dan kawan,2023).

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di BBPVP serang?
2. Berapa besar Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di BBPVP Serang?
3. Berapa besar Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di BBPVP serang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai di BBPVP serang.
2. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di BBPVP Serang.
3. Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di BBPVP serang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan Transformasional

Menurut Armansyah (2022:3) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah model pemimpin yang mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi secara jelas sehingga bawahan dapat mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat pada pengikut, memberikan motivasi pada bawahannya serta merangsang kreativitas untuk bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi.

Selanjutnya Iswahyudi (2023:99) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang kharismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang mereka butuhkan.

Disiplin Kerja

Menurut Hasibuan (2017:193) mengemukakan bahwa Disiplin kerja adalah kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi segala peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku.

Menurut Rivai dan kawan (2018:599), Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan.

Kinerja Pegawai

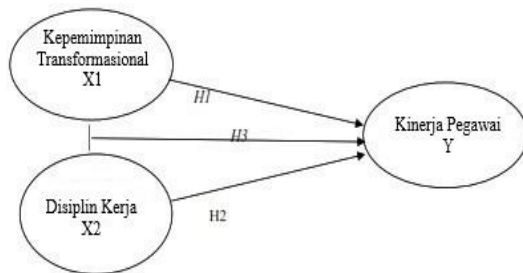
Menurut Mangkunegara (2017:67) mengatakan bahwa Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Menurut Hamali (2016: 98), Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu”

KERANGKA PENELITIAN

Adapun kerangka pemikiran berdasarkan deskripsi latar belakang, sbb

Gambar Model Penelitian



Hasil Analisis Data

Adapun hasil analisis linear berganda, sebagai berikut:

Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.847	1.311		1.409	.164
Jum_X1	.385	.162	.326	2.374	.021
Jum_X2	.500	.132	.522	3.796	.000

a. Dependent Variable: Jum_Y

Maka dapat disajikan persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 1.847 + 0.385X_1 + 0.500X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar **1.847**; artinya jika variabel X_1 dan X_2 nilainya adalah 0, maka kinerja pegawai nilainya sebesar **1.847**.
- Koefisien regresi variabel kepemimpinan transformasional (X_1) sebesar **0.385**; artinya jika kepemimpinan transformasional (X_1) mengalami

kenaikan sebesar 1 satuan, maka Kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **0.385**. Koefisien bernilai positif antara kepemimpinan transformasional dengan kinerja pegawai, maka semakin meningkat Kepemimpinan Transformasional maka kinerja pegawai akan semakin tinggi.

- Koefisien regresi variabel disiplin kerja (X_2) sebesar **0.500**; artinya jika disiplin kerja (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kinerja pegawai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar **0.500**. Koefisien bernilai positif antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai, maka semakin meningkat disiplin kerja maka kinerja pegawai akan semakin tinggi.

Hasil Analisis Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	591.538	2	295.769	57.929	.000 ^b
Residual	301.237	59	5.106		
Total	892.774	61			

a. Dependent Variable: Jum_Y

b. Predictors: (Constant), Jum_X2, Jum_X1

Hasil uji keseluruhan diatas, diketahui bahwa nilai Fhitung = 57,929 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,150 dan alpha hitung (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 (0,000 < 0,05). maka H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan transformasional (X_1) dan disiplin kerja (X_2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja pegawai (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel Kepemimpinan Transformasional terhadap kinerja pegawai adalah positif 0,385 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien jalurnya. dilihat dari nilai thitung sebesar 2,374 lebih besar dari 2,002, dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0.021 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0,021 < 0,05$). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai

2. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah positif 0,500 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien jalurnya. Dilihat dari nilai thitung sebesar 3,796 lebih besar dari 2,002, dan nilai signifikansi (Sig) yang diperoleh sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0,000 < 0,05$) artinya signifikan. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja secara individu terhadap kinerja pegawai

3. Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan, diketahui bahwa kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja dengan Fhitung = 57,929 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,150 dan alpha hitung (Sig.) sebesar

0,000 lebih kecil 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kinerja pegawai.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dapat diterima.
2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dapat diterima.
3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dapat diterima.

Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil tanggapan responden tentang variable kepemimpinan transformasional skor terendah jawaban responden adalah indikator yaitu memiliki kepekaan individu, untuk itu BBPVP Serang Provinsi Banten, untuk itu gaya kepemimpinan transformasional khususnya indicator kepekaan individu harus di evaluasi dan diperbaiki, agar ke depan lebih baik lagi, mengingat tanggapan responden akan hal tersebut paling rendah. Dengan adanya perbaikan tersebut maka gaya kepemimpinan akan semakin baik lagi.

2. Berdasarkan hasil tanggapan responden variabel disiplin kerja bahwa nilai skor terendah jawaban responden adalah indikator mengikuti aturan lainnya, maka dari itu BBPVP Serang Provinsi Banten, harus melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi aturan-aturan lainnya agar pegawai mengikuti aturan tersebut, mengingat dengan patuh terhadap aturan lainnya maka akan meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil tanggapan responden variabel kinerja pegawai menunjukkan bahwa skor terendah jawaban responden adalah indikator penekanan biaya yang dikeluarkan sesuai target, untuk itu BBPVP Serang Provinsi Banten, harus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pengeluaran lebih efisien dan efektif lagi, dengan cara melakukan Analisa apasaja kah pengeluaran yang harus di evaluasi dan diperbaiki. Agar kedepan pengeluaran lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Faizah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Medan: Madenatera
- Ajabar. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Afandi, pandi. 2017. *Concept & indicator Human Resources Management for Management Research*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Armansyah, (2022). *Kepemimpinan Transformasional, Transaksional Dan Motivasi Kerja*, (Sumatra Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Baidowi *et al* (2024). Pengaruh gaya kepemimpina transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja Karyawan PT. Sinar Mandiri Teknik Bekasi *Management Studies and Enterprenurship Journal*. Vol. 5 no. 2 2024
- Busro, Muhammad. 2020. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Buyung, Helmi, 2022. Monograf *Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika. Aditama Anggota Ikapi.
- Davis, Keith dan Newstrom. (2017). *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Deddy Mulyadi (2016). *Studi Kebijakan Public dan Pelayanan Public*. Cetakan 2. Bandung Alfabeta
- Eko Putro *et al* (2023). Pengaruh Kepemimpinan transformasional disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Dosen di Universitas Teknologi Surabaya *Jurnal ekonomika*45. Vol.11 no.1 Desember 2023.
- Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian unuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan. Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gumelar *et al* (2024). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Mas Muda Mandiri *Management Studies and Enterprenurship Journal*. Vol. 5 no. 2 2024

- Hamali, Arif Yusuf. (2016). *Pemahaman Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Hasibuan, Malayu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, (2023). *Gaya Kepemimpinan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja grafindo Jakarta.
- Kresna et al (2024). Pengaruh kepemimpinan transformasional, komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Pada UD. *Sumber rezeki Jurnal EMAS*. Vol. 5 No.10 Oktober 2024
- Muchdarsyah Sinungan (2011). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mannopo et al (2023). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Diskum Perindag Provinsi Gorontalo *Jurnal Mirai Management*, Vol.8. Issue 2023.
- Marilus dan kawan (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Semen Padang Departemen SDM *Jurnal Bina Bangsa ekonomika*. Vol.17. No.2. Agustus 2024.
- Nahdiyati dan kawan (2023). Pengaruh disiplin kerja Terhadap Kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupateen tabalong *JAPB*. Vol.6. No. 2. 2023
- Rafferty, A. L., & Griffin. (2017). *Dimensios of transformasional leadership: conceptual and empirical extensios*. *Journal of the leadership Quartly*, 329-354
- Ranna et al (2025). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pegawai kantor kecamatan Kabupaten Tanatoraja *Journal of Economic, Business and Accounting*. Vol.8. No.1 2025
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. (2018). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak dan Sarton Sinambela (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sinaga dan kawan (2024). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Ikhtiar Riau Jaya Raya Peranap *Jurnal Daya saing*. Vol. 10. No.3 Oktober 2024
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Dan R & D. Alfabeta, Penerbit CV: Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Usman, Husaini (2019). *Kepemimpinan Efektif Teori, Penelitian, dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua belas.

- Rajawali Pers. Depok.
- Warman. (2022). *Perilaku Organisasi Di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tjiptono, Fandy & Gregorius Chandra (2018) *Pemasaran Strategik* Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset

**ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA DENGAN METODE WORKLOAD
INDICATORS OF STAFFING NEED DI RUMAH SAKIT KRAKATAU
MEDIKA**

Anisa Fitriani¹

anisaalqufron@gmail.com

Muhammad Lukman²

muhammadlukman4488@gmail.com

Inneke Respatiningsih³

inneke.ir@gmail.com

Universitas Faletehan¹⁻³

ABSTRACT

The availability of Pharmacy Technical Personnel (TTK) aligned with workload plays a crucial role in supporting the quality of outpatient pharmacy services. A mismatch in staffing levels can lead to increased workloads and a decline in service quality. This final project aims to analyze TTK staffing requirements based on workload at the Outpatient Pharmacy of Krakatau Medika Hospital. A quantitative descriptive approach was employed, utilizing data collected through observation, interviews, and document review. The analysis was conducted based on work activities, effective working time, and service volume to determine staffing needs. The findings are expected to serve as a basis for optimal TTK staffing planning, thereby achieving balanced workloads, increased efficiency, and improved pharmaceutical service quality at the hospital.

Keywords: Pharmacy Technical Personnel, workload, staffing requirements, outpatient pharmacy.

ABSTRAK

Ketersediaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang sesuai dengan beban kerja berperan penting dalam menunjang mutu pelayanan farmasi rawat jalan. Ketidaksesuaian jumlah tenaga dapat menyebabkan peningkatan beban kerja dan menurunkan kualitas pelayanan. Penulisan Tugas akhir ini bertujuan menganalisis kebutuhan TTK berdasarkan beban kerja di Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Krakatau Medika. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Analisis dilakukan berdasarkan aktivitas kerja, waktu kerja efektif, dan volume pelayanan untuk menentukan kebutuhan tenaga. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi dasar perencanaan kebutuhan TTK yang optimal sehingga tercapai pemerataan beban kerja, peningkatan efisiensi, dan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Kata kunci: Tenaga Teknis Kefarmasian, beban kerja, kebutuhan tenaga, farmasi rawat jalan.

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Rumah sakit merupakan lembaga fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif. Kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Salah satu unit penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah instalasi farmasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan resep, konseling pasien, hingga monitoring efek samping obat. Pelayanan kefarmasian yang optimal dan aman memerlukan dukungan tenaga kefarmasian yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas berdasarkan Permen-kes No. 72 Tahun 2016.

Peningkatan beban kerja akibat pertumbuhan jumlah pasien dan beban kerja yang tidak seimbang pada tenaga teknis kefarmasian (TTK) dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan kerja staf. Kekurangan jumlah TTK dapat menyebabkan peningkatan waktu tunggu pelayanan lebih lama, resiko kesalahan dalam pemberian obat, serta menurunkan produktivitas kinerja. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang farmasi rawat jalan harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja nyata adalah metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN). Metode WISN direkomendasikan oleh WHO yaitu untuk menentukan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, Metode ini mempertimbangkan aktivitas kerja, standar waktu, dan faktor koreksi lainnya

sehingga menghasilkan perhitungan kebutuhan tenaga yang lebih realistis dan objektif. Penerapan metode WISN diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kesenjangan antara jumlah tenaga teknis kefarmasian yang tersedia dengan kebutuhan aktual berdasarkan beban kerja di Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Krakatau Medika.

TINJAUAN PUSTAKA

Model Bisnis

Model bisnis Rumah Sakit Krakatau Medika berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan pendekatan Patient-centered care. Sumber pendapatan utama berasal dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, baik melalui pembiayaan mandiri, asuransi, maupun program jaminan kesehatan nasional.

Proyek analisis kebutuhan tenaga ini mendukung model bisnis dengan memastikan bahwa sumber daya manusia yang tersedia mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.

Dalam hal ini, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga kesehatan yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. TTK berperan dalam pengelolaan obat dan bahan medis, termasuk penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, peracikan, pencatatan, serta pelayanan kepada pasien.

Tugas utama tenaga teknis kefarmasian antara lain:

1. Menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai resep.
2. Mengelola persediaan farmasi.
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
4. Mendukung pelayanan farmasi klinik.

Ketersediaan jumlah TTK yang memadai sangat penting agar pelayanan

berjalan efektif, aman, dan sesuai standar. hal ini dapat menjadi masukan untuk pihak manajemen rumah sakit atau pelayanan farmasi rawat jalan dengan menggunakan metode *Workload Indicators of Staffing Need (WISN)* metode ini dikembangkan untuk menghitung kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja nyata. Metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan volume kegiatan dan standar waktu penyelesaian setiap kegiatan.

Aspek Operasi

Kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan tenaga kerja di Farmasi Rawat jalan Rumah Sakit Krakatau Medika adapun aspek operasi yang akan dilakukan dalam kegiatan ini yaitu dengan perhitungan dan metode WISN dengan mengamati dan memperhitungkan beberapa faktor diantaranya adalah jadwal kerja karyawan, jumlah pasien, beban pekerjaan tenaga teknis kefarmasian, jenis layanan, waktu pelayanan, serta jumlah tenaga yang tersedia kemudian data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisa untuk mengukur kebutuhan tenaga teknis kefarmasian setelah diolah kemudian dijadikan bentuk laporan hasil kegiatan dan rekomendasi terkait hasil yang didapat untuk dilaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit.

Aspek Pasar dan Pemasaran

Ditinjau dari aspek pemasaran dalam kegiatan ini yaitu memahami kebutuhan tenaga kerja dan keinginan pelanggan untuk penyelesaian obat secara cepat dan tepat serta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, rumah sakit juga melayani pasien dari berbagai perusahaan, asuransi, serta peserta BPJS Kesehatan. Pemasaran Farmasi mengedepankan aspek-aspek, sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan
2. Kecepatan layanan
3. Keselamatan pasien
4. Ketersediaan obat

Pelayanan kefarmasian yang cepat dan akurat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu kepuasan pasien. Dengan adanya tenaga teknis kefarmasian yang sesuai kebutuhan, waktu tunggu pasien dapat ditekan sehingga memberikan nilai tambah dalam persaingan layanan kesehatan.

Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan studi kelayakan bisnis, elemen sumber daya manusia harus diperhatikan secara khusus. Ini karena kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja bisnis, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Dengan memperhatikan aspek ini, kegiatan bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan motivasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang berdampak positif pada perusahaan secara keseluruhan (Damayanti et al., 2023).

Aspek Keuangan

Menurut Damayanti et al., 2023 aspek keuangan mencakup analisis keuangan, yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan membangun hubungan antara item dalam laporan keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan selama periode tertentu. Dalam fokusnya aspek ini juga mengevaluasi seberapa besar biaya yang dikeluarkan, potensi pendapatan yang diperoleh, dan berapa lama investasi akan kembali.

Berdasarkan aspek keuangan tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang tepat untuk menghindari inefisiensi. Dengan menganalisis kebutuhan tenaga kerja manfaat yang didapat yaitu

mengoptimalkan biaya tenaga, meningkatkan produktivitas serta menghindari kelebihan dan kekurangan tenaga kerja dengan demikian, keputusan terkait rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih rasional dan berbasis data yang ada.

Berdasarkan pandangan luar farmasi rawat jalan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat apabila tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya dan dapat meminimalkan terjadinya komplek karena waktu tunggu penerimaan obat yang memakan waktu lama.

Aspek Teknologi Digital

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Rumah Sakit Krakatau Medika memanfaatkan teknologi seperti sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan rumah sakit untuk mengelola seluruh proses pelayanan dan administrasi secara terintegrasi dari mulai pendaftaran sampai kasir, E-prescribing (resep elektronik) merupakan sistem penulisan dan pengiriman resep secara elektronik oleh dokter melalui komputer atau sistem digital. dalam kerangka manajemen moder, teknologi digital berperan sebagai efisiensi operasional dan akurasi data. Data yang dihasilkan dari sistem ini dapat digunakan untuk analisis beban kerja secara lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian pada Bab I hingga Bab III, serta temuan lapangan pada Unit BPJS Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan kebutuhan tenaga teknis kefarmasian berdasarkan beban kerja adalah

terjadinya peningkatan jumlah resep yang tinggi.

NO	BULAN	JUMLAH RESEP
1	JANUARI	7401
2	FEBRUARI	7341
3	MARET	6916
4	APRIL	7484
5	MEI	7573
6	JUNI	7067
7	JULI	8235
8	AGUSTUS	7719
9	SEPTEMBER	8603
10	OKTOBER	9359
11	NOVEMBER	7936
12	DESEMBER	7988
JUMLAH RESEP		93622

Tabel 4.1 tabel jumlah resep pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah resep dari data menunjukkan bahwa volume pelayanan resep di Farmasi Rawat Jalan tergolong tinggi dengan rata-rata sekitar 7.802 resep per bulan. Terdapat fluktuasi jumlah resep sepanjang tahun, dimana beban kerja tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan 9.359 resep, pola ini menunjukkan bahwa Oktober merupakan puncak (peak) yang bersifat sementara, sehingga kemungkinan dipengaruhi oleh kunjungan pasien rawat jalan yang meningkat, peningkatan jumlah pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit dan perubahan musim dapat meningkatkan kasus penyakit tertentu seperti influenza, demam dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), bukan tren kenaikan yang berlanjut. Sedangkan beban kerja terendah terjadi pada bulan Maret dengan 6.916 resep.

Perbedaan jumlah resep antar bulan menunjukkan bahwa kebutuhan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) perlu mempertimbangkan variasi beban kerja pelayanan, terutama pada periode dengan

kunjungan pasien yang tinggi. Dengan total pelayanan sebanyak 93.622 resep per tahun, diperlukan jumlah tenaga yang memadai agar seluruh proses pelayanan kefarmasian, mulai dari penerimaan resep, penyiapan obat, pelabelan, hingga penyerahan obat kepada pasien dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai standar mutu pelayanan.

Kondisi ini muncul akibat kombinasi faktor internal yaitu operasional, SDM, teknologi. Adapun faktor eksternal yaitu aturan BPJS. Secara lebih rinci, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaklengkapan Dokumen Resep Manual
2. Kejelasan penulisan resep manual
3. Ketersediaan obat pada inventori Rumah Sakit
4. Pengerjaan obat racikan
5. Informasi pengerjaan resep pasien

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga teknis kefarmasian (TTK), ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tenaga yang tersedia dengan beban kerja pelayanan farmasi rawat jalan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan peningkatan waktu tunggu pasien, beban kerja yang tinggi, penurunan produktivitas, serta meningkatnya risiko kesalahan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya perbaikan berkelanjutan.

Pemecahan Masalah dari Aspek Operasional

Permasalahan operasional harus berfokus pada penghapusan waste (pemborosan waktu dan tenaga), peningkatan keselamatan pasien (patient safety), serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat alur kerja (throughput time). Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, aspek operasional berada pada rantai pelayanan langsung yaitu

sejak resep diterima hingga diserahkan ke pada pasien. Untuk menanggulangi hal tersebut, strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Standar Penerimaan dan skrining Resep

Rumah Sakit memerlukan standar dalam penerimaan dan skrining resep, jika ditemukan kendala resep, komunikasi dilakukan melalui fitur *chat* internal bisa melalui sistem rumah sakit yang sudah ada dan langsung terintegrasi dengan *handphone* dokter, bukan dengan TTK yang meninggalkan loket penerimaan untuk menghubungi dokter melalui *whatsapp*, sehingga menghemat waktu operasional.

2. Pemilahan dan Klasifikasi Resep

Setelah resep digital masuk, sistem langsung memberikan pop-up alert peringatan merah di layar komputer jika pasien pernah menebus obat yang sama dalam waktu dekat untuk mencegah duplikasi atau memiliki riwayat alergi tercatat sistem otomatis. Dan membagi resep ke dalam 3 jalur cetak printer (flagging) berbeda, Jalur biru (Non-Chronic Track) Pasien penyakit non kronis dengan paket INA-CBGs atau PRB BPJS langsung memunculkan lembar copy resep untuk 23 hari dan diambil pada faskes satu. Jalur hijau (Chronic Track) pasien penyakit kronis yang langsung terintegrasi pada sistem Apotik Online BPJS dan memunculkan lembar copy resep jika ada obat yang kosong. Jalur merah (Compounding Track) Pasien dengan obat racikan puyer atau kapsul.

3. Pengerjaan peracikan obat

Penyediaan untuk obat racikan dengan formula standar yang sangat sering diresepkan misalnya puyer batuk pilek anak standar dokter anak, TTK menyiapkan stok dalam jumlah tertentu pada pagi hari (pre-making) sebelum poli buka. Dan Menggantikan metode

penggerusan manual mortir dan stamper dengan blender obat khusus medis, serta investasi pada Automatic Powder Packing Machine yaitu mesin pembungkus puyer otomatis untuk memangkas waktu pengemasan hingga.

Pemecahan Masalah dari Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah tenaga teknis kefarmasian dalam farmasi serta tingginya beban kerja menjadi faktor penghambat utama dalam pelayanan resep. Untuk itu, pemecahan masalah SDM dapat dilakukan melalui berfokus pada peningkatan kompetensi, pembagian beban kerja yang adil (workload balancing), pengurangan tingkat stress atau kelelahan (burnout mitigation), serta penyelarasan keterampilan staf dengan sistem digital yang baru.

1. Pembagian peran secara spesifik

Struktur pembagian kerja di Farmasi Rawat Jalan sebaiknya dibagi menjadi peran yang spesifik, Untuk mendukung perubahan tersebut yaitu apoteker berfokus pada verifikasi resep digital awal, kendali mutu klinis, dan *Konseling, Informasi, dan Edukasi*. saat penyerahan obat di loket. Kemudian Tenaga Teknis Kefarmasian Sesuai Beban Kerjay aitu fokus murni pada mengambil obat, meracik, dan mengemas obat tanpa terganggu oleh interaksi langsung dengan pasien atau urusan administrasi klaim. Sedangkan Petugas Administrasi Khusus Fokus pada validasi status BPJS Non-BPJS dan pemberkasan klaim INA-CBGs, terpisah dari proses penyiapan obat.

2. Program pelatihan dan pengembangan

Pelatihan Keselamatan Pasien (Patient Safety Course) Pelatihan penyegaran rutin mengenai identifikasi obat LASA (Look Alike Sound Alike), pencegahan dispensing error pada obat racikan, dan penerapan prinsip 7 Benar

Pemberian obat. Dan mengikutsertakan staf dalam workshop berkala mengenai aturan retriksi Formularium Nasional (Fornas) dan regulasi BPJS Kesehatan terbaru agar pemahaman staf selalu up-to-date.

3. Perhitungan Beban Kerja dan Penjadwalan

Penumpukan antrean obat racikan maupun non racikan dan kekosongan inventori sering diperparah oleh ketidakseimbangan jumlah staf pada jam-jam sibuk (peak hours). Oleh karena itu menghitung kebutuhan jumlah Apoteker dan TTK berdasarkan volume lembar resep harian. Dan melakukan Penjadwalan Fleksibel Berbasis Peak Hours dengan Mengubah sistem sif konvensional menjadi sif fleksibel (staggered shifts). Menempatkan jumlah personel maksimal pada jam puncak kunjungan poliklinik misal pukul 09.00 - 14.00 WIB dan mengurangi personel pada jam-jam sepi. Kemudian setelah itu menyediakan staf cadangan dari farmasi rawat inap atau staf gudang yang siap diperbantukan (floating staff) ke farmasi rawat jalan jika antrean resep melonjak tajam agar tidak terjadi burnout.

4. Penerapan Sistem Reward, Kompensasi, dan Motivasi Kerja

Tingginya tekanan kerja di farmasi rawat jalan akibat komplain pasien dapat menurunkan motivasi kerja dan memicu tingginya angka pindah kerja (turnover). Hal itu harus diantisipasi dengan Insentif Berbasis Kinerja (KPI) yaitu memberikan bonus bulanan atau penghargaan berdasarkan indikator kinerja yang terukur, seperti kecepatan penyelesaian obat racikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Nihilnya angka error (Zero Medication Error). Kemudian melakukan program kesejahteraan mental (Staff Well-being) yaiaitu menyediakan ruang istirahat yang

memadai, rotasi kerja berkala 3 bulan di rawat jalan, 3 bulan di rawat inap untuk mencegah kejenuhan, serta pemberian apresiasi Officer of the Month.

Pemecahan Masalah dari Aspek Pemasaran

Kendala kekurangan tenaga teknis kefarmasian berdampak pada kepercayaan pasien dan citra rumah sakit di masyarakat. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah

1. Mengelola waktu tunggu pasien

Mengalihkan Perhatian (*Occupied Time Feels Shorter*) karena jumlah TTK kurang untuk mempercepat obat, ruang tunggu harus dipasarkan sebagai tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu. Sediakan WiFi berkecepatan tinggi dengan halaman masuk (*landing page*) promosi layanan RS. Kemudian mengubah visual pada monitor antrian digital jangan hanya menampilkan nomor, tapi tampilkan estimasi waktu tunggu yang jujur.

2. Promosi dan komunikasi

Edukasi akurasi dengan kecepatan (*Safety First Campaign*) membuat media komunikasi visual banner di area tunggu dengan pesan edukasi dan mengubah sudut pandang pasien waktu tunggu yang lama tidak lagi dilihat sebagai pelayanan lambat atau buruk, melainkan sebagai bentuk ketelitian dan kepedulian rumah sakit terhadap keselamatan pasien.

Pemecahan Masalah dari Aspek Keuangan

Pemecahan masalah dalam aspek keuangan harus berfokus pada strategi efisiensi biaya operasional (*cost efficiency*), penyelamatan pendapatan (*revenue protection*), minimnya TTK menyebabkan antrean panjang yang memicu kekecewaan pasien, meningkatkan angka resep yang

tidak ditebus (*prescription escape*), menunda proses klaim BPJS atau INA-CBGs, hingga meningkatkan risiko kerugian akibat salah hitung stok. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah

1. Penerapan *Home Delivery Service*

Membiarkan pasien pergi karena antrean lama, farmasi menyediakan opsi pengiriman obat ke rumah bekerja sama dengan pihak ketiga kurir atau ojek online. Biaya pengiriman dibebankan kepada pasien atau disubsidi silang dari margin keuntungan obat. Rumah sakit tetap mendapatkan laba penuh dari penjualan obat (*zero revenue loss*) tanpa perlu menambah beban kerja staf TTK pada jam sibuk, karena obat tersebut dapat diracik atau disiapkan pada sore atau malam hari saat poli sudah sepi.

2. Percepatan Arus Kas Klaim BPJS

Kekurangan TTK membuat proses verifikasi dan pemberkasan resep kronis dan PRB untuk klaim INA-CBGs tertunda, sehingga pencairan dana dari BPJS ke rumah sakit melambat (*delayed cash flow*). Dengan memperbaharui sistem rumah sakit yang terintegrasi dengan sistem apotik online agar sistem otomatis melakukan validasi kesesuaian resep dokter dengan Formularium Nasional atau Fornas dan restriksi BPJS sejak awal input. Dengan begitu memangkas waktu TTK untuk memeriksa lembar resep satu per satu secara manual. Hasilnya, berkas klaim dapat diajukan secara instan dan tepat waktu, menurunkan angka klaim yang ditolak/tertunda (*pending claim*), serta menjaga stabilitas likuiditas keuangan rumah sakit.

Pemecahan Masalah dari Aspek Teknologi Digital

Kurangnya integrasi sistem digital menyebabkan proses kesalahan input,

lambat, dan sulit dimonitor. Pemecahan masalah berbasis teknologi meliputi:

1. Fitur *Smart Screening & Hard-Stop* pada *E-Prescribing*

Memaksimalkan kecerdasan buatan sistem untuk melakukan penyaringan awal, sehingga mengurangi waktu TTK dalam memeriksa resep kertas atau melakukan klarifikasi manual ke dokter, sistem rumah sakit dikonfigurasi untuk mendeteksi interaksi antar obat yang telah diresepkan, duplikasi terapi maupun peringatan alergi obat, jika ada ketidaksesuaian, sistem akan memunculkan pemblokiran (*hard-stop*) pada layar dokter saat menginput resep, sehingga dokter harus langsung menggantinya. Resep yang masuk ke farmasi sudah dipastikan benar 100%, membebaskan TTK dari tugas klarifikasi via telepon yang membuang waktu.

2. Transparansi antrian mandiri

Mengurangi pertanyaan pasien yang menayakan status obat yang terjadi di farmasi sehingga kerap membuat konsentrasi TTK terganggu maka hal ini dapat dilakukan dengan integrasi WhatsApp Gateway dan Live Queue Tracking Saat dokter mengirim resep elektronik, pasien menerima pesan WhatsApp otomatis berisi tautan web (link) untuk memantau proses obat mereka secara real-time dari ponsel sama seperti melacak pesanan makanan online. Dan menyediakan layar TV di ruang tunggu yang membagi status pengerjaan resep menjadi tiga kolom yaitu sedang disiapkan, sedang diracik dan siap diambil dengan menyertakan estimasi waktu tiap proses agar pasien dapat mengestimasi waktu tunggu mereka secara mandiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan tenaga teknis kefarmasian pada unit BPJS farmasi rawat jalan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Aspek Pemasaran

Peningkatan resep yang berakibat pada aspek pemasaran jasa rumah sakit, kondisi tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya waktu tunggu pelayanan resep, berkurangnya kepuasan pasien, memicu risiko hilangnya pendapatan (*prescription escape*) serta menurunnya persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan farmasi

2. Aspek Operasional

Penyesuaian jumlah TTK yang belum sesuai, disertai optimalisasi alur kerja, pemanfaatan teknologi informasi seperti SIMRS dan e-prescribing, serta penguatan standar operasional prosedur kerja untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Menghentikan pola kerja ganda (*multitasking*), dengan penambahan jumlah TTK sesuai kebutuhan, diperlukan pula upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengaturan distribusi kerja yang lebih efektif, evaluasi kinerja secara berkala, serta pemberian motivasi dan penghargaan untuk menjaga kinerja dan kepuasan kerja petugas.

4. Aspek Keuangan

Lambatnya pelayanan akibat keterbatasan tenaga memicu risiko hilangnya potensi pendapatan dari pasien umum yang membatalkan resep (*prescription escape*), serta menghambat proses pemberkasan klaim BPJS yang berdampak pada penundaan arus kas (*delayed cash flow*).

5. Aspek Teknologi Digital

Sistem informasi rumah sakit

(SIMRS) belum terintegrasi dengan sistem Apotik Online. Sehingga klaim obat kronis BPJS masih dilakukan secara manual

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, N., Tresya Widastuti, A., Paningal, B., Rosyadi, I., Julia, I., Dede Sinatra, R., & Ananda Triesa, S. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis Pada Salon Laulina Beauty Corner Meliputi: Aspek Keuangan, Aspek Pasar Dan Pemasaran, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Hukum Dan Aspek Lingkungan. In *Business, And Accounting Journal Homepage* (Vol. 3, Issue 2).
- Wulan Anindita Sari, Nur Syarianingsih Syam (2020). Analisis Perhitungan Kebutuhan Tenaga Farmasi dengan Metode *Workload Indicator Staffing Needs* (WISN) di Puskesmas Imogiri I. in *International Journal of Healthcare Research* VOL 3.
- American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). (2014). *ASHP guidelines on pharmacistconducted patient education and counseling*. ASHP Publications Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Yulis Ramdhan Fadilah, Rian Arie Gustaman, Nissa Noor Annashr (2025). Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Kefarmasian Berdasarkan Metode Wisn Di Rsu Syifa Medina Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan komunitas Indonesia* Vol 21.
- Tonis, M., Firdaus, M., Bisra, M., & Arrum, P. G. (2022). *Edukasi Alur Pelayanan IGD Rumah Sakit di Mesjid Husnul Khotimah Kota Pekanbaru*. 6 No1,1181–1188.<https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.4536>.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023: Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (merupakan dasar hukum penghitungan tarif kapitasi FKTP dan tarif klaim paket INA-CBGs di rumah sakit).
- Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan.
- Siagian, S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed. 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed. Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik* (Ed. 3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muninjaya, A. A. G. (2018). *Manajemen Kesehatan* (Ed. 2). Jakarta: EGC.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja* (Ed. 5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, A. (2016). *Pengantar Administrasi Rumah Sakit* (Ed. 3). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Aditama, T. Y. (2015). *Manajemen Administrasi Rumah Sakit* (Ed. 2). Jakarta: UI Press.
- Notoatmodjo, S. (2018). *_Metodologi Penelitian Kesehatan_*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 3). Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.